



***CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI INSTRUMEN MEMPERTAHANKAN
KEKUASAAN: STUDI KASUS KEPEMIMPINAN PRESIDEN NICOLÁS
MADURO DI VENEZUELA (TAHUN 2017-2019)**

***CRYPTOCURRENCY AS AN INSTRUMENT FOR RETAINING POWER: A
CASE STUDY OF THE LEADERSHIP OF PRESIDENT NICOLÁS
MADURO IN VENEZUELA (YEAR 2017-2019)***

SKRIPSI

Oleh

**Muhammad Arif Furqon
NIM 140910101032**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



***CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN MEMPERTAHANKAN
KEKUASAAN: STUDI KASUS KEPEMIMPINAN PRESIDEN NICOLÁS
MADURO DI VENEZUELA (TAHUN 2017-2019)***

***CRYPTOCURRENCY AS AN INSTRUMENT FOR RETAINING POWER: A
CASE STUDY OF THE LEADERSHIP OF PRESIDENT NICOLÁS
MADURO IN VENEZUELA (YEAR 2017-2019)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

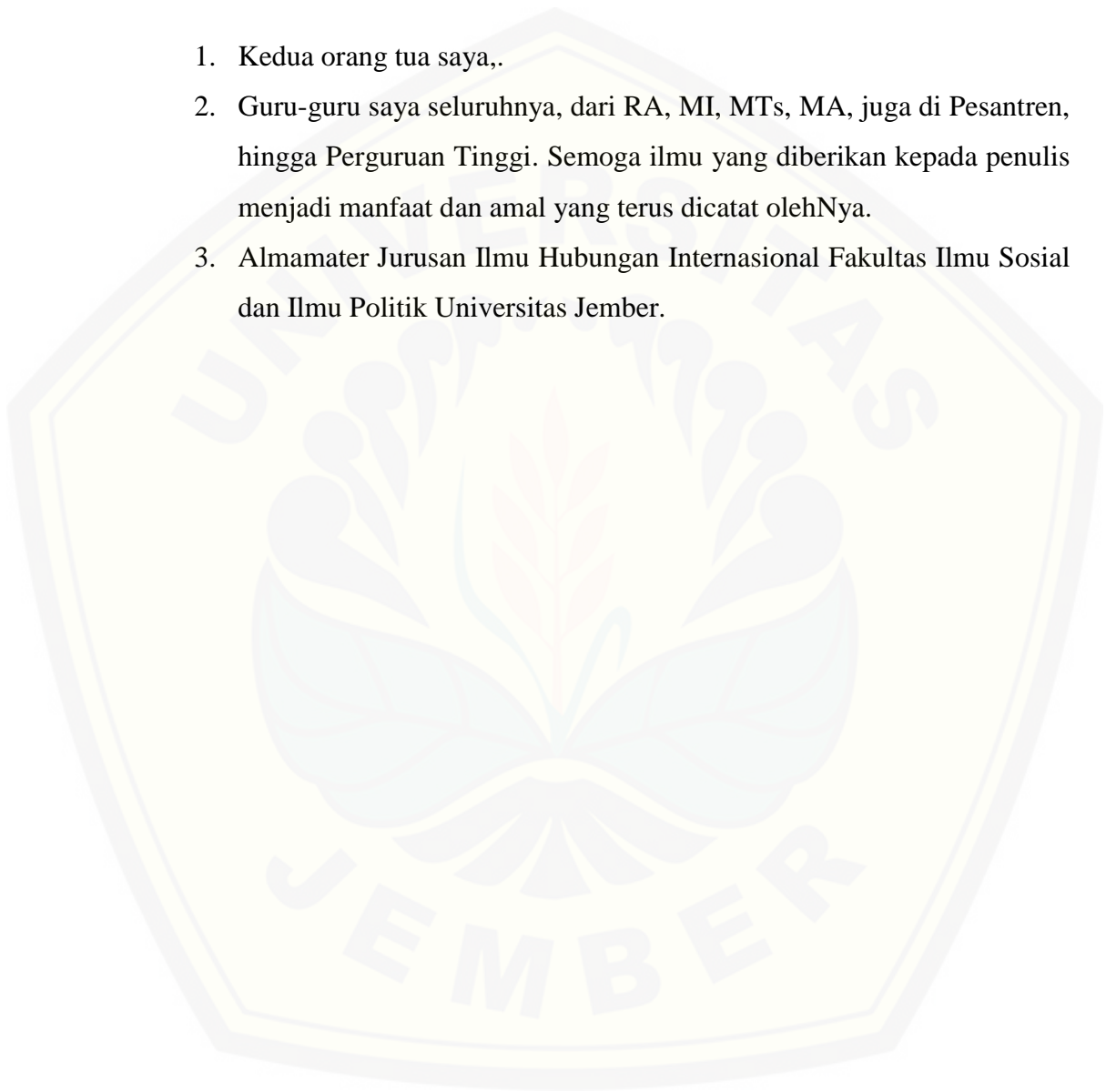
oleh
Muhammad Arif Furqon
NIM 140910101032

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya,.
2. Guru-guru saya seluruhnya, dari RA, MI, MTs, MA, juga di Pesantren, hingga Perguruan Tinggi. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis menjadi manfaat dan amal yang terus dicatat olehNya.
3. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“Man Telatena Panena.”¹
(Ust. Mas’ud)



¹ Motto yang digunakan penulis disini adalah mengutip ungkapan yang sering disampaikan oleh guru penulis sewaktu masih belajar di pondok pesantren.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Furqon

NIM : 140910101032

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “*Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Mempertahankan Kekuasaan: Studi Kasus Kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro Di Venezuela (Tahun 2017-2019)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Oktober 2020

Yang Menyatakan,

Muhammad Arif Furqon

NIM. 140910101032

SKRIPSI

***CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN MEMPERTAHANKAN
KEKUASAAN: STUDI KASUS KEPEMIMPINAN PRESIDEN NICOLÁS
MADURO DI VENEZUELA (TAHUN 2017-2019)***

***CRYPTOCURRENCY AS AN INSTRUMENT FOR RETAINING POWER: A
CASE STUDY OF THE LEADERSHIP OF PRESIDENT NICOLÁS
MADURO IN VENEZUELA (YEAR 2017-2019)***

Oleh:

Muhammad Arif Furqon

(NIM 140910101032)

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama

: Dr. Sunardi Purwoatmoko, M.IS.

Dosen Pembimbing Anggota

: Dr. Puji Wahono, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Mempertahankan Kekuasaan: Studi Kasus Kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro Di Venezuela (Tahun 2017-2019)” karya Muhammad Arif Furqon telah diuji dan disahkan pada:
hari, tanggal :

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua,

Agus Trihartono, S.Sos., M.A., Ph.D.

NIP 196908151995121001

Anggota I

Anggota II

Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D.

NIP 197701052008012013

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si.

NIP 197812242008122003

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.

NIP 196002191987021001

RINGKASAN

“CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN: STUDI KASUS KEPEMIMPINAN PRESIDEN NICOLÁS MADURO DI VENEZUELA (TAHUN 2017-2019)” ; Muhammad Arif Furqon; 140910101032; 2020; 107 halaman: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Jatuhnya Venezuela sebagai negara kaya minyak dimulai pada 2014 ketika harga minyak dunia turun drastis. Minyak Venezuela memperoleh 95% dari pendapatan ekspor. Ketika Presiden Hugo Chavez memimpin dari tahun 1999 hingga kematiannya pada tahun 2013, Chavez menggunakan sebagian dana tersebut untuk membiayai sejumlah program sosial guna mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, namun sejak kematiannya dan jatuhnya harga minyak, Venezuela telah memasuki fase krisis. Saat kepemimpinan penggantinya, Nicolas Maduro, Venezuela semakin terjerumus ke berbagai krisis, krisis kemanusiaan, krisis ekonomi dan politik. Pada tahun 2017, Maduro mengumumkan pernyataan yang menimbulkan pro dan kontra, bahwa ia menerapkan *Cryptocurrency* dengan nama "Petro" yang didukung oleh cadangan minyak, gas, emas dan berlian dengan klaim bahwa itu bisa membantu Venezuela dalam masalah kedaulatan moneter, untuk melakukan transaksi keuangan dan mengatasi blokade keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan Maduro sebagai Presiden Venezuela. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan data dan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Konsep yang digunakan dalam skripsi ini adalah Two Level Game yang menganalisa kegiatan politik dua arah oleh Maduro dengan penerapan *Cryptocurrency* di ranah domestik dan internasional dengan tujuan mempertahankan kekuasaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maduro menjadikan "Petro" sebagai mata uang digital untuk jual beli minyak guna menjaga nilai jual yang diinginkan

Venezuela dan menekan agar tidak terlalu terpengaruh hiperinflasi. Pada ranah domestik, Maduro ingin menekan protes atas penggulingannya sebagai Presiden dan tidak mengakui Juan Guaido (oposisinya yang mendapatkan legitimasi oleh berbagai Negara sebagai Presiden pengganti Maduro), sehingga penggunaan Petro diwacanakan pada rakyat Venezuela sebagai sebuah solusi. Hal ini menyebabkan ia menjadi salah satu upaya yang ditempuh Maduro agar kondisi krisis terlihat ditangani dengan baik. Sedangkan pada ranah Internasional, tindakan Maduro dalam menerapkan Petro banyak mendapatkan cibiran dan hingga saat ini tidak bisa menuntaskan masalah krisis Venezuela, negara Amerika Serikat dan bahkan banyak negara sekutu Venezuela telah berpaling mendukung legitimasi Guaido sebagai Presiden Venezuela. Meski demikian Maduro dalam berbagai kesempatan menyampaikan klaim kesuksesan Petro yang mana melalui penjualannya ia mampu mendapatkan dana internasional meskipun sedang dikenai sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN: STUDI KASUS KEPEMIMPINAN PRESIDEN NICOLÁS MADURO DI VENEZUELA (TAHUN 2017-2019)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis
2. Bapak Sunardi selaku Dosen Pembimbing 1
3. Bapak Puji selaku Dosen Pembimbing 2
4. Bapak/ibu selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama saya menjadi mahasiswa Universitas Jember.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas bantuan dan kontribusi ilmu selama penulis menjalani studi.
6. Sahabat dan teman-teman saya, terima kasih atas kontribusi positif kalian selama saya menjadi mahasiswa Universitas Jember.

Terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.

Jember, 2020

Penulis

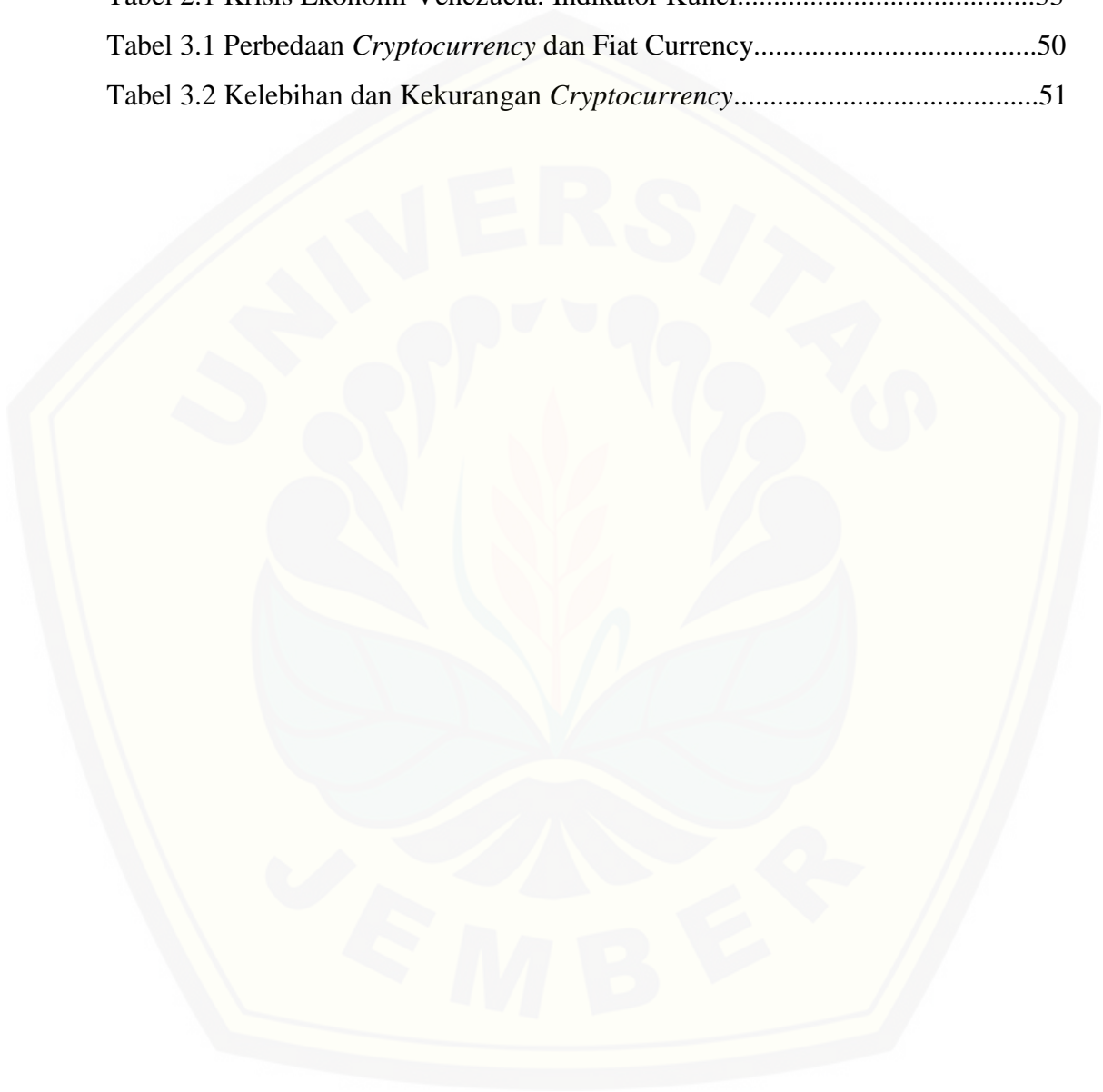
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
SKRIPSI	vi
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	8
1.2.1 Batasan Materi	8
1.2.2 Batasan Waktu	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Kerangka Dasar Pemikiran	11
1.6.1 Konsep Two Level Game	11
1.6.2 Konsep <i>Cryptocurrency</i>	14
1.7 Argumen Utama	14
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.2 Metode Analisis Data.....	16
1.9 Sistematika Penulisan	17

BAB 2. VENEZUELA: KRISIS BERKELANJUTAN YANG TERUS MEMBURUK	19
2.1 Politik dan Pemerintahan	19
2.2 Sistem Ekonomi	27
2.3 Krisis Ekonomi	30
2.3.1 Kesalahan Manajemen Ekonomi Selama Ledakan Harga Minyak	31
2.3.2 Reaksi dan Dampak Internasional dari Krisis Venezuela	35
2.3.3 Tekanan Internasional atas Kepemimpinan Nicolas Maduro	42
2.3.4 Kehadiran “Petro” dalam Krisis Venezuela.....	44
BAB 3. CRYPTOCURRENCY DAN DAMPAK YANG DIBAWANYA TERHADAP VENEZUELA	47
3.1 Sejarah <i>Cryptocurrency</i>	47
3.2 Sistem dan Mekanisme <i>Cryptocurrency</i>	50
3.3 Kebaikan dan Keburukan <i>Cryptocurrency</i>	54
3.4 Regulasi Terhadap <i>Cryptocurrency</i>	54
3.4.1 Manfaat dan Pro Kontra <i>Cryptocurrency</i> di Beberapa Negara	58
3.5 Petro: <i>Cryptocurrency</i> Buatan Pemerintah Venezuela	64
3.5.1 Dampak <i>Cryptocurrency</i> Bagi Venezuela	68
BAB 4. <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Instrumen Mempertahankan Kekuasaan Oleh Presiden Nicolás Maduro Di Venezuela	71
4.1 Strategi dan Dampak Pada Lingkup Domestik atas Penerapan <i>Cryptocurrency</i> oleh Maduro untuk Mempertahankan Kekuasaannya	71
4.1.1 Kesalahan Manajemen Minyak di Venezuela.....	72
4.1.2 Status Quo Nicolas Maduro di Venezuela	75
4.1.3 Propaganda Petro Sebagai Solusi Krisis	78
4.2 Strategi dan Dampak Pada Lingkup Internasional atas Penerapan <i>Cryptocurrency</i> oleh Maduro untuk Mempertahankan Kekuasaannya	80
4.2.1 Sokongan Minyak untuk Transaksi Petro	85
4.2.2 Dukungan Rusia Terhadap Petro: Ambisi yang Sama	89
4.2.3 Respon Positif China Terhadap Petro: Sebuah Pragmatisme.....	93
4.2.4 Petro Belum Layak Disebut Sebagai Solusi Krisis	96
BAB 5. KESIMPULAN	98
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Krisis Ekonomi Venezuela: Indikator Kunci.....	33
Tabel 3.1 Perbedaan <i>Cryptocurrency</i> dan Fiat Currency.....	50
Tabel 3.2 Kelebihan dan Kekurangan <i>Cryptocurrency</i>	51



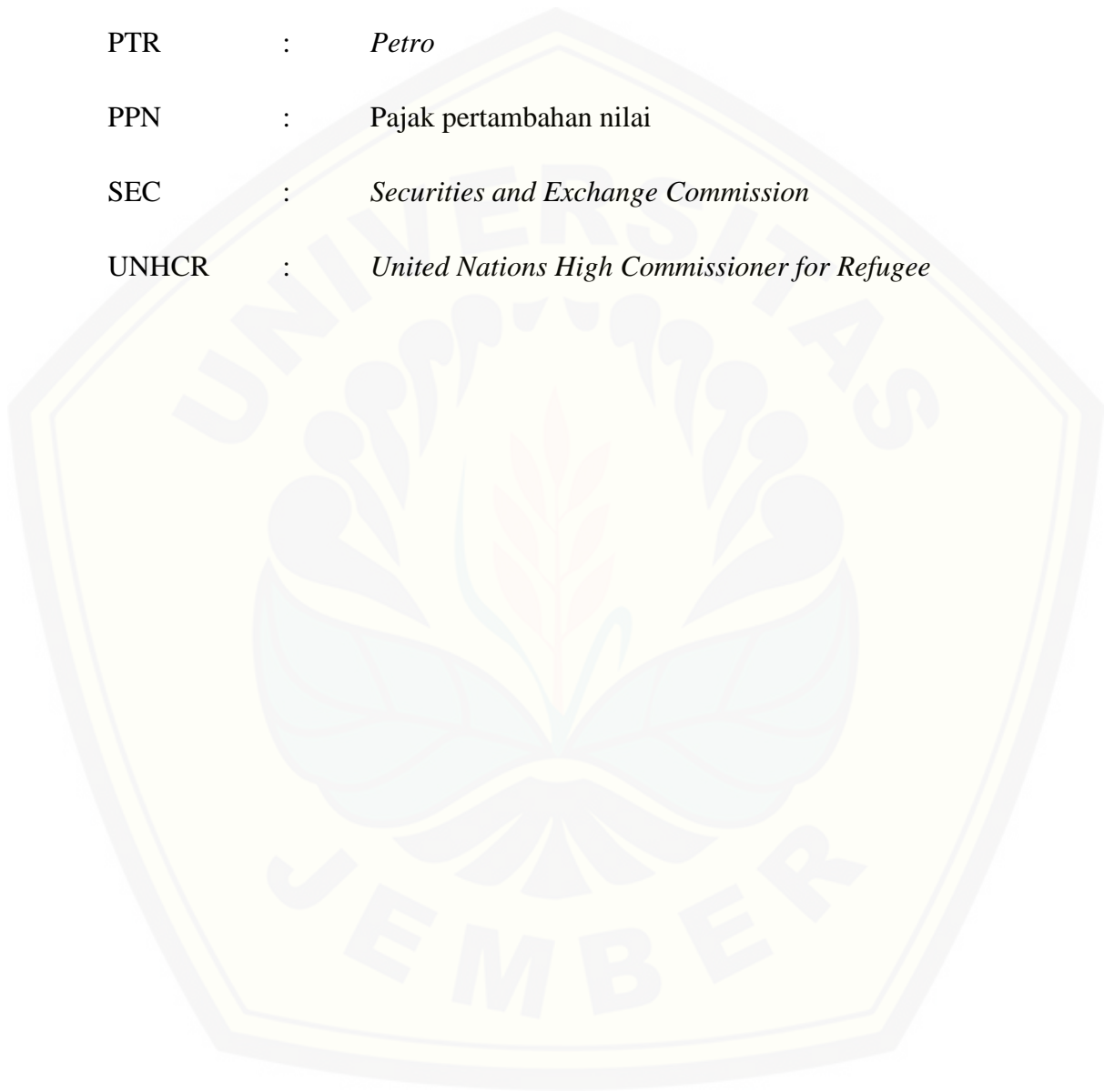
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 GDP per Kapita Venezuela.....	29
Gambar 2.2 Tingkat Inflasi Tahunan (%).....	30
Gambar 2.3 GDP Per Kapita Venezuela dengan Dolar Internasional Th. 2011....	31
Gambar 3.1 Ilustrasi proses transaksi keuangan yang tersentralisasi.....	49
Gambar 3.2 Ilustrasi proses transaksi keuangan yang terdesentralisasi.....	50
Gambar 4.1 Keterkaitan prospek produksi minyak Venezuela dengan prospek politik.....	70

DAFTAR SINGKATAN

AD	:	<i>Accion Democratica</i>
AML	:	<i>Anti Money Laundering</i>
ALBA	:	<i>The Bolivarian Alliance For The Peoples Of Our America</i>
ASONACRIP	:	<i>National Association of Cryptocurrency</i>
CIA	:	<i>Central Intelligent of America</i>
COPEI	:	<i>Comité de Organización Política Electoral Independiente</i>
DLT	:	<i>Distributed Ledger Technology</i>
ECLAC	:	<i>Economic Commission for Latin America and the Caribbean</i>
EPI	:	Ekonomi Politik Internasional
GPP	:	<i>Great Patriotic Party</i>
IADB	:	<i>Inter-American Development Bank</i>
ICO	:	<i>Initial Coin Offerings</i>
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KYC	:	<i>Know Your Customer</i>
MUD	:	Democratic Unity Roundtable
MVR	:	<i>Movimiento Quinta República</i>
OPEC	:	<i>Organization Of The Petroleum Exporting Countries</i>
PEMILU	:	Pemilihan Umum

- PDVSA : *Petróleos de Venezuela*
- PSUV : Partai Sosialis Persatuan Venezuela atau United Socialist
Party of Venezuela
- PTR : *Petro*
- PPN : Pajak pertambahan nilai
- SEC : *Securities and Exchange Commission*
- UNHCR : *United Nations High Commissioner for Refugee*



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mampu mengubah berbagai aspek kehidupan, alat tukar dan sistem keuangan pun tidak bisa dikecualikan. Dikehendaki atau tidak, dunia akan terus beradaptasi dan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Teknologi berkembang melalui penemuan dan inovasi. Manusia senantiasa melakukan inovasi dengan tujuan untuk memperbaiki dan mempermudah kehidupannya. Pada era digital ini perkembangan teknologi diikuti berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat dan mencakup banyak hal. Antara inovasi teknologi yang ada, beberapa diantaranya bisa digolongkan sebagai *disruptive innovation*. Yakni inovasi yang memiliki sifat mengganggu atau merusak tatanan atau pasar yang ada sebelumnya (Christensen, 2015). Contoh dari *disruptive innovation* yang dampaknya sangat nyata bagi kita terjadi dalam sektor jasa transportasi, yakni hadirnya aplikasi smartphone seperti Uber, Grab, Go-Jek dan sejenisnya (Kasali, 2017). Namun berbeda dengan disrupsi yang diakibatkan aplikasi-aplikasi tersebut terhadap pasar konsumen jasa transportasi yang merupakan sektor riil, telah muncul teknologi baru berbasis digital yang berpotensi mengubah alat tukar dan sistem keuangan yang ada.

Tahun 2009 merupakan awal beroperasinya bitcoin sebagai *disruption* baru yang menantang tatanan atau sistem keuangan yang saat ini berlaku. Sistem keuangan yang ada hingga saat ini, bersifat tersentralisasi dalam setiap negara dan terintegrasi secara internasional. Sebaliknya bitcoin yang menggunakan teknologi *blockchain* dan *cryptography*, ia merupakan *Cryptocurrency* yang sistem operasinya terdesentralisasi (Baron, 2015). Berbeda dengan *fiat money*² yang memiliki otoritas sentral, bitcoin dibuat tanpa adanya otoritas sentral yang punya

² *Fiat money* adalah mata uang yang dideklarasikan oleh suatu Pemerintahan sebagai legal tender namun tidak disokong oleh komoditas fisik. Nilai dari *fiat money* bergantung pada hubungan penawaran dan permintaan terhadapnya, yakni dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap Pemerintah yang ada dibelakangnya. (Sumber : Cerdasco.com. 2018. Uang Fiat: Definisi, Cara Kerja, Fungsi, Pro, Kontra. Diakses dari : <https://cerdasco.com/uang-fiat/>. Pada 8 Februari 2018

wewenang untuk mengaturnya termasuk Satoshi Nakamoto sendiri sebagai penemu bitcoin. Tidak ada yang mengetahui identitas asli dari Satoshi Nakamoto hingga saat ini. Nama tersebut adalah nama anonim dari *programmer* di suatu forum online.

Sebagai *Cryptocurrency*, gagasan yang diusung bitcoin adalah menciptakan sistem pembayaran *peer-to-peer*³ yang tidak bisa dilacak maupun dikendalikan oleh otoritas sentral tertentu dengan memanfaatkan teknologi *cryptography* dan *blockchain*⁴. Hal ini yang membuat beberapa pihak mengaitkan bitcoin sebagai perwujudan dari gagasan kelompok *cyberpunk*⁵ (Wijaya, 2017). Bitcoin sebagai induk *Cryptocurrency* menarik banyak perhatian dan mampu mengkapitalisasi dana yang tidak kecil, sehingga harga bitcoin mampu meroket dengan pesat. Bitcoin yang awalnya tidak berharga telah berubah menjadi sangat berharga. Bahkan dalam satu tahun terakhir bitcoin mengalami peningkatan harga hingga 1773%, dari 818 USD (harga pada tanggal 14 Januari 2017) menjadi 14.500 USD (harga pada tanggal 13 Januari 2018) per bitcoin (Blockchain.info, 2018). Alasan kenaikan yang begitu pesat tersebut tidak lain adalah karena permintaan terhadap bitcoin yang sangat tinggi dibandingkan penawarannya. Hal inilah yang membedakannya dengan *fiat money*, nilai bitcoin tidak bergantung pada otoritas yang mengaturnya (Volkering, 2017).

Bisa dikatakan bahwa bitcoin sebagai *Cryptocurrency* menjadi mata uang dengan sistem yang paling demokratis (Baron, 2015). Karena dalam praktiknya,

³ Maksud dari *peer-to-peer* adalah sistem yang meniadakan pihak ketiga dalam transaksi yang dilakukan. Jadi pihak pertama dan pihak kedua bisa melakukan transaksi secara langsung. Namun agar keamanan transaksi tersebut bisa dijaga, yakni terhindar dari manipulasi, dalam teknologi *blockchain* yang digunakan pada Bitcoin terdapat sistem *mining* (penambangan) oleh jaringan komputer yang terdesentralisasi (Sumber : Baron, Joshua dkk. 2015. National Security Implication of Virtual Currency: Examining the Potential for Non State Actor Deployment. California: Rand Corporation)

⁴ *Blockchain* adalah teknologi yang memungkinkan adanya transparansi pencatatan menggunakan kriptografi di mana dalam kasus *Cryptocurrency* ia seolah menjadi buku besar untuk mencatat setiap transaksi Bitcoin yang terjadi (Sumber : Wijaya, Dimaz Ankaa dan Oscar Darmawan. 2017. Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia. Jasakom.com)

⁵ Pada tahun 90-an muncul suatu kelompok yang menamai dirinya *cyberpunk*. Mereka adalah kelompok yang menentang Pemerintah Amerika Serikat karena melarang teknologi kriptografi (Sumber : Wijaya, Dimaz Ankaa dan Oscar Darmawan. 2017. Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia. Jasakom.com)

setiap perubahan yang akan dilakukan pada sistem/program bitcoin bisa diusulkan semua pihak tanpa terkecuali, namun harus mendapatkan suara minimal 51% dari seluruh penambang/*miner*⁶ bitcoin di dunia (Volkering, 2017). Namun ada satu aspek yang sering dipermasalahkan oleh banyak pihak khususnya otoritas keuangan, yakni sifat bitcoin yang anonim atau oleh beberapa pengamat disebut pseudo-anonim⁷ (Baron, 2015). Meskipun *blockchain* bersifat publik, namun tidak menampilkan data berupa identitas lengkap pemilik suatu alamat tertentu, sehingga muncul banyak stigma negatif terhadap bitcoin yang cenderung digunakan untuk transaksi ilegal dan kejahatan-kejahatan lainnya, khususnya kejahatan *cyber* (Baron, 2015).

Apakah nantinya bitcoin atau teknologi *Cryptocurrency* ini akan menggantikan *fiat money*? Pertanyaan ini telah mengusik banyak pengamat, khususnya para ahli di bidang teknologi keuangan. Memahami fenomena kemunculan *Cryptocurrency* dari sudut pandang teknologi saja tidak cukup. Pemahaman yang mendalam tentang sistem ekonomi dan keuangan juga wajib dimiliki. Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu kiranya dipaparkan terlebih dahulu perbandingan antara keduanya. Sistem keuangan dan alat tukar telah mengalami berbagai perubahan seiring berkembangnya peradaban. Apabila sebelum adanya *Cryptocurrency* telah berlaku alat tukar dan sistem keuangan tertentu, mengapa ia bisa bertahan hingga saat ini?

Transaksi ekonomi, atau pemenuhan kebutuhan manusia yang melibatkan lebih dari satu pihak dengan kepentingan atau kebutuhan yang berbeda membutuhkan media yang bisa disepakati sebagai ukuran pertukaran. Model yang

⁶ Penambang (*miner*) adalah pihak yang melakukan penambangan bitcoin dengan daya komputasi yang disebut *hash*. Penambangan dilakukan untuk memvalidasi setiap transaksi yang terjadi dan pembuatan blok baru untuk disertakan dalam *blockchain*. Penambang yang berhasil menemukan block baru akan mendapatkan reward berupa bitcoin. Selain itu semua penambang juga mendapat reward dari biaya transaksi (Sumber : Volkering, Sam. 2017. *Crypto Revolution: Bitcoin, Cryptocurrency and The Future of Money*. London: Southbank Investment Research Ltd.).

⁷ Tidak benar-benar anonim atau anonim semu. Maksudnya bitcoin yang dianggap bisa menyediakan sarana transaksi yang anonim pun sebenarnya bisa dilacak alur transaksinya sampai terlihat siapa yang melakukan transaksi tersebut (Sumber : Bohme, Rainer dkk. 2015. *Bitcoin: Economics, Technology and Governance*. Journal of Economic Perspectives Volume 29 Nomor 2. Nashville: American Economic Association).

paling primitif memang tidak membutuhkannya di mana manusia biasa melakukan barter secara langsung. Namun semakin berkembang dan kompleksnya kebutuhan manusia mengharuskan adanya sistem yang mempermudah transaksi tersebut. Dari yang awalnya menggunakan komoditas tertentu, lalu koin berbahan logam mulia, akhirnya setelah muncul konsep negara bangsa yang berdaulat kita mengenal yang namanya *fiat money* yang saat ini kita gunakan setiap hari.

Setiap negara yang berdaulat memiliki mata uangnya sendiri, meskipun dalam beberapa kasus ada penggabungan mata uang sebagai hasil integrasi ekonomi kawasan. Ada otoritas keuangan yang memiliki kewenangan mengatur mata uang tersebut. Sederhananya ada otoritas sentral yang berwenang mengatur mata uang tersebut. Lalu dengan terjadinya interaksi antar negara, terbentuklah sistem keuangan dan moneter internasional yang juga telah beberapa kali mengalami perubahan. Kehadiran *Cryptocurrency* berbeda dengan kasus perubahan-perubahan yang terjadi sistem keuangan dan moneter internasional sebelumnya. Jika dulu perubahan terjadi karena adanya perubahan peta politik dan ekonomi dunia, dalam arti lain masih *state centric*. *Cryptocurrency* muncul dari pihak *non-state*, yang juga secara teknis bersifat desentral sehingga tidak ada otoritas tunggal yang bisa mengintervensinya, termasuk negara.⁸

Maka bisa kita katakan bahwa kemunculan *Cryptocurrency* tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Pemerintah maupun otoritas keuangan negara-negara di dunia. Faktanya respon yang muncul dari berbagai negara sangat beragam. Ada yang dengan cepat beradaptasi, sehingga telah dibuat aturan yang jelas mengenai bitcoin. Beberapa negara masih mempertimbangkan dan membahas secara matang tentang kebijakan yang seharusnya diambil. Jepang misalnya, merupakan negara yang paling bersahabat dengan *Cryptocurrency* di mana bitcoin secara resmi menjadi sebagai mata uang alternatif di samping Yen. Terhitung sejak 1 April 2017, bitcoin menjadi mata uang kedua di Jepang (Wijaya, 2017). Berapa

⁸ Penjelasan mengenai *Cryptocurrency* yang lebih jelas dan menyeluruh akan disampaikan pada bab berikutnya.

perusahaan ritel di Jepang juga menyediakan mekanisme pembayaran menggunakan bitcoin (CNBC Report, 2017). Negara-negara lain yang juga merespon positif dengan melegalkan bitcoin meskipun dengan aturan yang berbeda-beda, ialah Amerika Serikat, Kanada, Australia, Inggris, Finlandia, Jerman, dan Belgia (Bajpai, 2015).

Sebaliknya, di Indonesia telah diatur bahwa setiap *virtual currency*⁹ dilarang untuk digunakan sebagai alat transaksi pembayaran oleh semua penyelenggara jasa sistem pembayaran. Mata uang digital non rupiah tidak dilegalkan dengan alasan bahwa telah diatur dalam UU Nomor 07 Tahun 2011 tentang mata uang bahwa Rupiah merupakan satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia (Agusman, 2018). Namun jual beli *Cryptocurrency* masih diizinkan oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa negara memang memperketat aturan mengenai *Cryptocurrency* di bidang tertentu, seperti Indonesia. Namun ada beberapa negara yang melarang secara penuh penggunaan *Cryptocurrency* dan menganggapnya ilegal seperti Islandia, Vietnam, Bolivia, Kyrgyzstan, dan Ekuador (Bajpai, 2015).

Venezuela adalah salah satu negara yang saat ini memberikan izin untuk beroperasinya *Cryptocurrency*. Sikap tersebut tidak begitu saja muncul. Melainkan telah melalui berbagai dinamika dan perubahan. Pada awalnya tidak ada jasa penukaran mata uang Bolivar ke bitcoin. Masuknya bitcoin pertama kali ialah melalui masyarakat Venezuela yang melakukan *mining* (Choudhury, 2017). Namun Pemerintah Venezuela yang mengetahui adanya aktivitas *mining* tersebut menangkap dan memenjarakan oknum-oknumnya (Zuniga, 2017). Meskipun belum ada sama sekali aturan yang jelas mengenai *Cryptocurrency* di Venezuela, Pemerintah pada awalnya cenderung melarang segala aktivitas yang berkaitan dengan *Cryptocurrency*. Selain bisa dilihat dari aksi penangkapan para *miner*,

⁹ *Virtual currency* merupakan konsep yang mengarah pada teknologi mata uang yang lebih umum. Secara sederhana dapat dipahami bahwa tidak semua *virtual currency* merupakan *Cryptocurrency*, sebaliknya setiap *Cryptocurrency* pasti *virtual currency* (Sumber : Baron, Joshua dkk. 2015. National Security Implication of Virtual Currency: Examining the Potential for Non State Actor Deployment. California: Rand Corporation.).

Pemerintah Venezuela juga memutuskan alur deposit dan penarikan dana ke perusahaan SurBitcoin (Suberg, 2017). Menanggapi sikap Pemerintah Venezuela tersebut, rakyat Venezuela tidak berhenti melainkan melakukan *mining* dan melakukan jual beli *Cryptocurrency* secara sembunyi-sembunyi (Rands, 2017).

Melihat perkembangan *Cryptocurrency* yang ditandai dengan kenaikan harganya yang begitu pesat tersebut akhirnya Pemerintah Venezuela menanggapi dengan lebih serius. Sedikit demi sedikit Pemerintah Venezuela mulai condong untuk mendukung dan menerima *Cryptocurrency*. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya izin beroperasinya Monkeycoin, perusahaan penukaran *Cryptocurrency* yang berkantor pusat di Venezuela (Admin, 2017). Hal yang paling mengejutkan adalah Presiden Nicolas Maduro dalam pidatonya saat perayaan natal tahun 2017 menyatakan bahwa Venezuela akan mengeluarkan *Cryptocurrency*-nya sendiri yang disokong oleh persediaan minyak yang dimiliki Venezuela (Admin, 2018).

Apabila kita membandingkan negara-negara di dunia dalam hal pengembangan teknologinya kita akan menemukan fakta bahwa Venezuela bukanlah negara yang termasuk baik pengembangan teknologinya. Sebagaimana dilaporkan oleh *The Global Information Technology Report 2016*, Venezuela menempati posisi 108 dari total 139 negara dalam indeks kesiapan jaringan (*Network Readiness Index*). Apabila digolongkan berdasarkan kawasannya, maka di kawasan Amerika Latin Venezuela menempati posisi keempat paling bawah (Silja, Dutta, & Lanvin, 2016). Indonesia yang berada pada posisi 73, berada di tingkat pengembangan teknologi rata-rata namun menyikapi kehadiran *Cryptocurrency* dengan cukup skeptis. Kanada dan Jepang yang sama-sama berada pada posisi 15 tertinggi tentu tidak aneh jika mampu merespon positif kemunculan *Cryptocurrency*, meskipun respon tersebut hanya berupa regulasi yang mendukung beroperasinya *Cryptocurrency* di wilayahnya. Kembali pada Venezuela yang tak hanya merespon *Cryptocurrency* dengan menerimanya namun juga berencana mengeluarkan *Cryptocurrency* sendiri yang disokong dengan

pasokan minyak nasionalnya merupakan langkah yang tidak biasa untuk ditempuh suatu negara.

Hal di balik dinamika yang terjadi pada Pemerintah Venezuela dalam menyikapi kemunculan *Cryptocurrency* sebenarnya kondisi ekonomi dan politik domestiknya saat ini sedang mengalami krisis. Krisis ini di mulai dari jatuhnya harga minyak dunia, Venezuela mulai mengalami krisis ekonomi. Tidak bisa disangkal bahwa perekonomian Venezuela sangat bergantung pada ekspor minyak (Mauliana, 2017). Hutang yang sangat besar tidak mampu dibayarnya sehingga membuat Venezuela mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat di mana semua instansinya dilarang membeli obligasi yang dikeluarkan oleh Venezuela, baik Pemerintah maupun bank sentralnya (Krauss, 2017). Inflasi dengan cepat naik, bahkan telah menyentuh angka 4000%. Selain itu mata uang Bolivar mengalami depresiasi hingga 57% sehingga dengan drastis menurunkan upah minimum bulanan hingga setara 4,3 USD (Agustiyanti, 2017).

Bersamaan dengan krisis ekonomi yang melanda Venezuela saat ini, stabilitas politiknya juga terguncang. Kericuhan tidak jarang terjadi di jalanan saat rakyat yang tidak puas dengan kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro melakukan demonstrasi (Idler, 2017). Oposisi yang juga memiliki pendukung yang besar semakin menentang Pemerintah (Flannery, 2017). Kritik dari oposisi tidak jarang melayang dan dengan tajam menghujam Pemerintahan Maduro. Begitu pula pernyataan Maduro tentang rencana untuk menciptakan *Cryptocurrency* sendiri dengan sokongan persediaan minyak Venezuela tidak lepas dari kritik pihak oposisi. Pihak oposisi dengan nada pesimis menyatakan bahwa upaya tersebut akan gagal dan pasti gagal mendapat persetujuan kongres (Staff, 2018).

Tekanan bagi Presiden Nicolas Maduro untuk melepaskan jabatan kePresidenannya begitu besar baik domestik maupun internasional. Selain dinilai otoriter, Pemerintah Venezuela saat ini dianggap tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang terjadi. Amerika Serikat adalah negara yang paling vokal dalam

menyikapi krisis Venezuela, bahkan tidak jarang dikeluarkan sanksi-sanksi seperti pelarangan membeli obligasi dan membatasi pembelian minyak (Berlianto, 2018). Sebaliknya Presiden Nicolas Maduro menyalahkan Amerika Serikat sebagai penyebab memburuknya kondisi ekonomi Venezuela. Dalam pidatonya pada penghujung tahun 2017 tersebut terkesan bahwa mengeluarkan *Cryptocurrency* sendiri yang disokong persediaan minyak Venezuela merupakan jalan keluar dari krisis yang dialami bahkan kekangan Amerika Serikat (Agustiyanti, 2017).

Melihat kondisi Venezuela tersebut, lalu dikaitkan dengan respon Pemerintah Venezuela terhadap *Cryptocurrency* yang berbeda dengan negara lainnya, membuat penulis tertarik untuk mengkajinya melalui perspektif studi Hubungan Internasional. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian terkait topik tersebut dengan judul **“Cryptocurrency Sebagai Instrumen Mempertahankan Kekuasaan: Studi Kasus Kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro Di Venezuela (Tahun 2017-2019)”**.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan pembatasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup materi yang akan menjadi inti dari pembahasan pada penelitian. Batasan dalam ruang lingkup penelitian berisi hal-hal yang bersifat inti yang akan dibahas oleh penulis sehingga menjadikan penulisan lebih fokus dan mencapai target penelitian. Dalam penelitian ini ruang lingkup pembahasan dibagi dalam batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi dibutuhkan penulis untuk menentukan ruang pembahasan objek yang dapat memberikan fokus terhadap penelitian dan menentukan garis besar materi yang terdapat dalam karya tulis ini. Penelitian ini akan membahas penggunaan *Cryptocurrency* sebagai strategi Presiden Nicolas Maduro dalam mempertahankan kekuasaannya.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dibutuhkan dalam sebuah karya tulis sebagai penanda kapan sebuah penelitian dimulai dan berakhir. Dengan adanya batasan waktu maka permasalahan yang ditulis dalam karya tulis akan menjadi runut. Batasan waktu yang dimaksud ialah rentang waktu dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Batasan waktu awal penelitian yakni tahun 2017 didasarkan pada waktu pertama harga minyak turun drastis dan Petro diumumkan oleh Maduro. Sedangkan batas akhir penelitian didasarkan pada waktu Presiden Nicolas Maduro merealisasikan Petro.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian dilakukan untuk mempelajari dan menjawab pertanyaan tertentu yang secara spesifik menjadi fokus penelitian. Maka dari itu dalam menyusun suatu rancangan penelitian wajib ditentukan terlebih dahulu rumusan masalahnya. Selain itu rumusan masalah akan menjadi rambu-rambu bagi sang peneliti agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu melebar pembahasannya (Creswell, 2017). Nawawi menjelaskan rumusan masalah sebagai gambaran dari adanya kondisi yang timpang antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dan apa yang senyatanya (*das sein*), sehingga menimbulkan rasa keingintahuan untuk memahaminya secara mendalam dan obyektif (Nawawi, 1991).

Venezuela sebagai negara yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi juga menghadapi guncangan politik domestik yang menjadikannya tidak stabil. Presiden Nicolas Maduro menuai banyak kritik bahwa ia telah keliru dalam melakukan manajemen ekonomi negara yang dipimpinnya, meskipun banyak pengamat ekonomi yang menyampaikan bahwa kondisi saat ini merupakan warisan Presiden sebelumnya. Kemunculan *Cryptocurrency* dengan cepat merasuk ke segala penjuru dunia. Tidak terkecuali Venezuela, masyarakat yang telah mengenal bitcoin mulai melakukan penambangan bitcoin serta memperjualbelikannya. Pemerintah Venezuela memiliki respon yang berubah-ubah, namun secara mengejutkan pada akhirnya *Cryptocurrency* diterima. Saat

masih banyak negara yang sibuk mengkaji *Cryptocurrency* dan membatasinya dengan peraturan yang ketat, Venezuela malah menerimanya dan bahkan berencana untuk mengeluarkan *Cryptocurrency*-nya sendiri. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Mengapa Maduro Menerapkan *Cryptocurrency* untuk Mempertahankan Kekuasaannya?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Creswell (2017) menjelaskan tujuan penelitian sebagai pernyataan yang menunjukkan maksud dilakukannya penelitian, berupa gagasan umum yang mengarah pada sesuatu yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui alasan Maduro menggunakan *Cryptocurrency* sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaannya. Saat banyak negara memperketat regulasi terkait *Cryptocurrency*, negara Venezuela yang dikenal sosialis dengan Pemerintahan yang otoriter malah menerimanya. Terutama kondisi ekonomi Venezuela dalam beberapa tahun terakhir yang mengalami krisis serta munculnya sanksi-sanksi ekonomi dari negara maju seperti Amerika Serikat, tentu memiliki keterkaitan dengan keputusan Venezuela menerima *Cryptocurrency*..

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian disebut juga signifikansi penelitian. Manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan Pemerintah, maupun masyarakat luas (Universitas Jember, 2016:48). Berdasarkan pengertian tersebut manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan perkembangan bagi studi Ilmu Hubungan Internasional pada umumnya, dan kajian Ekonomi Politik Internasional khususnya.

1.6 Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran harus terdapat dalam setiap penulisan karya ilmiah, karena kerangka dasar pemikiran menunjukkan posisi penulis dari sudut pandangan mana dia melihat pada apa yang ditelitinya. Kerangka pemikiran harus terdapat dalam setiap penulisan karya ilmiah.

Kerangka dasar pemikiran dapat berupa konsep-konsep atau teori yang disusun secara sistematis untuk membantu penulisan dan pemahaman analisis yang dilakukan. Konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu. Konsep adalah suatu kata yang melambungkan gagasan, bukan sesuatu hal asing dan digunakan sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasarkan ciri-ciri relevansinya bagi kita (Mas'ood, 1990). Sedangkan menurut Robert K. Yin (2011) konsep-konsep dalam suatu kerangka pemikiran dapat menunjukkan atau memuat suatu abstraksi teori yang kemudian dapat membantu menganalisis fenomena yang ada.

American Heritage Dictionary mendefinisikan teori sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang dapat diterapkan secara relatif pada berbagai situasi khususnya terdiri dari sebuah sistem asumsi, prinsip-prinsip yang diterima dan peraturan yang berguna untuk menganalisis, memprediksi atau menjelaskan sifat atau tingkah laku suatu fenomena tertentu (Spring D. & Wolinsky Y, 2004).

Berlandaskan itulah maka penulis disini menggunakan konsep:

1.6.1 Konsep Two Level Game

Konsep Two-Level Games yang diprakarsai oleh Robert D. Putnam merupakan sebuah metamorfosa yang terjadi pada dua ranah yaitu internasional (level 1) dan domestik (level 2). Seperti yang dijelaskan oleh Putnam dalam bukunya yang berjudul *Diplomacy and Domestic Politics: the logic of Two-Level Games* yang dipublikasikan tahun 1988. Menurut Putnam politik internasional dan

domestik tidak bisa berdiri sendiri karena keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Jika melihat pada kasus Venezuela dalam kepemimpinan Maduro dan menerapkan *Cryptocurrency* sangat sesuai dianalisis dengan Two-Level Games karena, dalam kaitan *Cryptocurrency* adalah mata uang yang dipakai untuk transaksi, baik secara domestik maupun internasional, dan pada ranah domestik hal ini digunakan oleh Maduro sebagai strateginya dalam usaha agar Venezuela keluar dari krisis yang melanda.

Putnam menjelaskan pada level domestik terdapat kelompok-kelompok yang akan menekan Pemerintah dengan kepentingannya sehingga membuat Pemerintah mengadopsi kebijakan yang menguntungkan kelompok domestik. Poin mengenai terdapatnya kelompok domestik yang menekan Pemerintah ini bisa dilihat pada tanggapan dan aksi beberapa kelompok. Kelompok-kelompok yang menekan Pemerintah disini dapat dilihat adalah kelompok penentang Maduro yang menginginkan agar Maduro lengser dari kepemimpinannya kelompok ini adalah pendukung Juan Guaido, Juan Guaido ini juga memiliki pendukung baik di Venezuela maupun luar negeri, seperti Amerika.

Pada konsep Two-Level Game juga dijelaskan bahwa pada level internasional, Pemerintah domestik berusaha memaksimalkan kemampuan mereka untuk memenuhi kepentingan dari kelompok domestik, sambil meminimalisir konsekuensi yang merugikan dari sebuah forum internasional. Hal inilah mengapa Pemerintah harus memprioritaskan kedua ranah ini (Putnam R. D., 1988, hal. 433-434). Two-Level Games menjelaskan setiap pemimpin politik suatu negara harus terlibat di dalam semua level permainan baik secara langsung atau tidak langsung. Pada level internasional terdapat diplomat atau negosiator sebagai perwakilan suatu negara melakukan diplomasi terhadap anggota negara-negara lain. Pada poin ini akan berkesinambungan dengan hasil akhir jika Presiden sebagai pemimpin negara tidak bisa membawakan dan meyakinkan kepentingan domestik pada level internasional maka Presiden akan mendapatkan citra buruk pada ranah domestik (Bonasir, 2015).

Tidak hanya akan mendapatkan citra buruk, terdapat beberapa kompleksitas yang tidak biasa dalam Two-Level Games salah satunya seperti setiap aktor yang bermain di ranah internasional memiliki tekanan yang berasal dari kancah domestik negaranya. Hal tersebut yang membuat perdebatan dan lobi-lobi di internasional harus ditekankan dengan tujuan untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Walaupun setiap aktor menghormati perbedaan kepentingan pada tingkat internasional, tetapi hasil akhir dari sebuah perundingan akan diterima atau tidaknya suatu kebijakan berada di ranah keputusan domestik.

Menyadari mengenai pentingnya kemenangan yang harus didapat pada kedua ranah, peran dan strategi yang dimiliki oleh negosiator sangatlah penting oleh karena itu pada level internasional dan domestik negosiator harus memahami Win-Set untuk mendapatkan kepentingan di dua ranah. Pada dasarnya Putnam menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) macam faktor penentu *Win-Set*. Pertama adalah preferensi atau koalisi, poin *Win-Set* merupakan poin dari salah satu faktor penentu kemenangan yang terdapat pada level domestik. Pada poin ini menjelaskan bahwa koalisi atau golongan yang mendukung terhadap suatu kebijakan sangat berperan dalam menekan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah kebijakan mengenai penerimaan pengungsi internasional (Putnam, 1998, hal. 442). Kedua adalah faktor kelembagaan Pemerintah, pada faktor ini menunjukkan bahwa proses ratifikasi tergantung pada kelembagaan dan regulasi suatu negara. *Win-Set* ini merupakan set paling sulit untuk dianalisis pasalnya setiap negara memiliki sistem kelembagaannya dan regulasinya masing-masing dan tidak bisa disamakan satu sama lain. *Win-Set* yang terakhir adalah strategi negosiasi, pada bagian *Win-Set* terakhir ini terapkan pada level internasional. Bagian ini menjelaskan bagaimana negosiator bisa menerapkan strateginya untuk membawakan kepentingan domestiknya pada ranah internasional.

Pada penelitian ini fokus kepada pembahasan mengenai gagasan 2 level oleh Robert Putnam, yakni pada ranah internasional (level 1) dan domestik (level 2). Presiden Nicolas Maduro diasumsikan sebagai negosiator yang sedang

melakukan proses negosiasi dalam dua level tersebut. Tujuan atau win set yang dimilikinya adalah kekuasaannya akan tetap bertahan. Penerapan *Cryptocurrency* dianggap sebagai strategi Maduro dalam proses negosiasi tersebut. Melalui konsep two level game Putnam ini dapat diketahui bahwa masing-masing level memiliki kondisi yang berbeda sehingga dalam proses mencapai *win-set* tersebut Maduro punya strategi yang berbeda. Perlu penulis perjelas bahwa penggunaan konsep Putnam khususnya pada bagian *Win Set* tidak akan digunakan mutlak sama persis sesuai apa yang telah Putnam sampaikan, mengingat kasus penelitian ini bukanlah kasus tentang negosiasi.

1.6.2 Konsep *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini (Ramadhani, 2020). Kata “*Cryptocurrency*” berasal dari gabungan dua kata, yaitu “*cryptography*” yang mempunyai arti kode rahasia, dan “*currency*” yang berarti mata uang. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan.

Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau *peer-to-peer*. Namun, seluruh transaksi yang dilakukan tersebut tetap dicatat dan dipantau dalam sistem jaringan *Cryptocurrency*. Penambang *Cryptocurrency* adalah mencatat transaksi ini dan memperoleh komisi berupa uang digital yang bisa dipakai.

1.7 Argumen Utama

Argumen utama adalah dugaan atau jawaban sementara dari analisa permasalahan penelitian. Dengan mengacu pada latar belakang, rumusan masalah,

dan konsep yang telah dipaparkan, maka argumen utama penulis adalah sebagai berikut:

Presiden Nicolas Maduro menggunakan *Cryptocurrency* sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan politiknya sebagai presiden Venezuela karena menganggap teknologi yang ditawarkannya bisa menyokong legitimasi mata uang *cryptocurrency* sebagai pengganti mata uang Bolivar yang telah jatuh, serta membuka akses alternatif terhadap dana internasional di tengah sanksi ekonomi yang dikeluarkan Amerika Serikat.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk memperoleh informasi dan menganalisisnya berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam karya tulis ilmiah adanya metode penelitian menjadikan karya tulis ilmiah lebih terstruktur dengan baik. Suatu penelitian mempunyai rancangan penelitian tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondisi data yang dikumpulkan, serta dengan cara bagaimana data tersebut dihimpun dan diolah. Tujuan rancangan penelitian adalah melalui penggunaan metode penelitian yang tepat, dirancang pada kegiatan yang dapat memberikan jawaban yang diteliti terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Metode berkenaan dengan prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena hubungan internasional diperoleh. Pendekatan keilmuan dari sebuah penelitian menjadi penting, sehingga penemuan esensi dari sebuah fenomena hubungan internasional bisa diketahui. Pendekatan keilmuan sangat berkaitan dengan metode. Definisi metode menurut The Liang Gie, yaitu

“....cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala pada ujung awalnya. Ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya untuk meluruskan kebenaran dari

pertanyaan-pertanyaan yang disebut mengenai suatu gejala tersebut.”
(The Liang Gie, 1997: 328)

Berdasarkan definisi metode menurut The Liang Gie, maka metode penelitian menjadi acuan penulis untuk menganalisis dan menjawab suatu permasalahan sehingga didapatkan pola yang berkaitan dengan jawaban permasalahan yang diajukan. Metode penelitian mencakup dua tahap yakni pengumpulan data dan analisis data.

1.8.1 Metode Pengumpulan Data

Data merupakan dasar dari suatu penelitian. Hasil penelitian yang valid diperoleh apabila data-data yang dikumpulkan valid dan kredibel. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai sumber karena data-data yang didapat dan dikumpulkan oleh penulis tidak diperoleh langsung dari sumbernya dan semua data tersebut berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Dalam mendapatkan data-data tersebut, penulis melakukan penelitian di beberapa tempat, antara lain:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember

Sedangkan penulis mendapatkan sumber-sumber informasi dari:

1. Buku
2. Surat Kabar
3. Internet

1.8.2 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2013: 248).

Dalam penelitian skripsi ini, metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian deskriptif berupaya untuk menggambarkan fakta-fakta dengan memberi data yang akurat dan tepat. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian dilakukan dengan menganalisis fenomena mengenai *Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Mempertahankan Kekuasaan: Studi Kasus Kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro Di Venezuela (Tahun 2017 hingga tahun 2019).

1.9 Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Venezuela: Krisis Berkelanjutan yang Terus Memburuk

Pada bab 2 penulisan karya ilmiah ini, peneliti akan menjelaskan tentang profil negara Venezuela, sistem politik Pemerintahan, sistem ekonomi serta kondisi krisis yang dihadapinya.

Bab 3. *Cryptocurrency* dan Dampak yang Dibawanya Terhadap Venezuela

Pada bab 3 menjelaskan pondasi yang mendasari sistem *Cryptocurrency* bisa bekerja, bagaimana hal ini pada akhirnya menjadi begitu fenomenal, dampak apa yang di bawa terhadap sistem ekonomi keuangan, serta berbagai perkembangan yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya bab 3 juga membahas sikap negara-negara terhadap kehadiran *Cryptocurrency* termasuk Venezuela.

Bab 4. *Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Mempertahankan Kekuasaan Oleh Presiden Nicolás Maduro Di Venezuela

Pada Bab 4 ini dilakukan analisis mengenai penggunaan *Cryptocurrency* sebagai strategi Presiden Nicolas Maduro untuk mempertahankan kekuasaannya di Venezuela, yang mana melalui konsep two level game dijelaskan bagaimana strategi Maduro di level internasional maupun di level domestik.

Bab 5. Kesimpulan

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan uraian yang telah dituliskan pada bab-bab sebelumnya.



BAB 2. VENEZUELA: KRISIS BERKELANJUTAN YANG TERUS MEMBURUK

Venezuela merupakan negara berpenghasilan menengah ke atas di Amerika Selatan dengan cadangan minyak terbesar di dunia, mengalami apa yang oleh banyak analis digambarkan sebagai salah satu krisis ekonomi dan politik terburuk dalam sejarahnya (McCharty, 2017b). Pada saat Presiden Hugo Chávez memimpin (1998-2013) periode harga minyak dunia umumnya tinggi, sebaliknya saat penggantinya, yakni Nicolas Maduro memimpin, Venezuela mengalami kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh harga minyak global yang rendah ditambah mismanajemen ekonomi serta korupsi dalam Pemerintahan dan militer.

Kondisi demokrasi dan hak asasi manusia memburuk di bawah kekuasaan Chavez, namun ia secara umum mengizinkan pemilihan umum terjadi (McCharty, 2017a). Menurut Freedom House, Venezuela telah jatuh dari "sebagian bebas" di bawah Chavez menjadi "tidak bebas" di bawah Maduro, seorang pemimpin yang menolak perbedaan pendapat dengan keras, mencegah agar Majelis Nasional tidak berfungsi, membatalkan pemilu ulang, dan menunda pemilihan (Puddington, 2017). Sejak akhir Maret 2017, puluhan orang telah tewas dan ribuan orang ditahan karena protes telah dibatalkan oleh pasukan keamanan dan milisi sipil bersenjata (Cawthorne, 2017).

Pada bab ini membahas lebih rinci tentang Venezuela, agar nantinya dalam melakukan analisis bisa memberikan hasil yang tepat, setidaknya perlu dipahami terlebih dahulu kondisi Venezuela, baik sistem politik dan Pemerintahannya, sistem ekonominya, serta krisis yang saat ini sedang melanda Venezuela

2.1 Politik dan Pemerintahan

Keberlimpahan Minyak di Venezuela sangat mempengaruhi pola politik dan Pemerintahan di negara tersebut. Kekayaan Venezuela didapat dari kemajuan industri

modern ketika ditemukan ladang minyak sekitar tahun 1917. Menjelang tahun 1930-an, minyak bumi menjadi perekonomian yang dominan di Venezuela. Sekarang Venezuela merupakan produsen minyak besar dunia bersama dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Negara-Negara di Timur Tengah. Venezuela juga merupakan produsen utama bijih besi, emas, dan intan. Namun, pada kenyataannya minyak bumi dan pertambangan memberikan 98% total ekspor Venezuela. Walaupun mendominasi, minyak dan sektor pertambangan ini hanya mempekerjakan kurang dari 2% angkatan kerja. Hanya lebih kurang 50.000 dari 5.000.000 pekerja di negara itu terlibat dalam industri minyak. Produksi minyak di Venezuela mencapai 1.000.000 barel per hari (dari sekitar 3.200.000 barel per hari pada 1972 menjadi sekitar 2.200.000 barel per hari pada tahun 1980) guna mencegah kehabisan cadangan minyaknya (Soyomukti, 2007: 71) . Namun, Venezuela tetap menjadi produsen minyak terbesar kelima di dunia

Hampir semua pengamat mengatakan bahwa minyak adalah dasar bagi bentuk-bentuk hubungan sosial politik dalam masyarakat Venezuela. Terry Lynn Karl (1993; 301) mengatakan bahwa “minyak merupakan aktor tunggal terpenting yang menjelaskan penciptaan kondisi-kondisi struktural bagi kehancuran otoritarianisme militer dan keberlangsungan suatu sistem demokratis.” Masalah minyak ini, menandai keberhasilan ekonomi Venezuela, juga merupakan penyebab pertentangan antara rakyat biasa dengan kalangan konglomerat swasta yang menguasai perusahaan minyak untuk kepentingan sendiri. Pertentangan dan ketidakadilan tersebut yang kemudian memunculkan gerakan revolusioner di Venezuela. Awal abad ke-20, Venezuela dikuasai Pemerintahan yang otoriter dan diktator.

Presiden-Presiden dari kalangan militer berkuasa pada periode tersebut sehingga militer ikut campur tangan langsung terhadap Pemerintahan. Sejak tergulingnya Jenderal Marcos Perez Jimenez pada tahun 1958 dan kebijakan penarikan militer secara langsung dalam politik negara, Venezuela mengalami transformasi menjadi negara demokrasi pada masa Pemerintahan Presiden Romulo Betancourt (berkuasa dari tahun 1958 hingga tahun 1964), meletakkan dasar corak politik yang baru. Sistem multipartai diterapkan di Venezuela. Partai Sosial Demokrasi *Accion Democratica* (AD) dan Partai Kristen Demokratis *Comité de*

Organización Política Electoral Independiente (COPEI) mendominasi perpolitikan di Venezuela hingga pemilu tahun 1998 (Soyomukti, 2007: 75).

Pada tahun 1989, Carlos Andres Perez yang terpilih lagi sebagai Presiden, mulai menempuh paket neoliberal yang disponsori oleh *International Monetary Fund* (IMF). Privatisasi industri milik negara, penghapusan subsidi-subsidi, dan devaluasi mata uang yang dipaksakan ke publik mendapatkan protes dalam bentuk pemogokan buruh-buruh, aksi-aksi mahasiswa, dan bahkan kerusuhan yang bernuansa kekerasan. Kenaikan harga gas menjadi pemicu terakhir hingga pada tanggal 27 Februari 1989, kerusuhan meledak di Caracas dan kota-kota lain di Venezuela. Secara spontan, massa mengamuk di jalanan.

Pada tanggal 4 Februari 1992, Letnan Kolonel Hugo Rafael Chavez Frias melakukan kudeta gagal. Ia ditangkap dan dipenjarakan. Setelah dibebaskan dari penjara, Hugo Chavez muncul dengan keberanian untuk membawa rakyat keluar dari krisis Pemerintahan yang terjebak dalam kebijakan neoliberal. Ia dan kawan-kawan seperjuangannya membentuk organisasi politik resmi yang dinamakan MVR (*Movimiento Quinta Republica*) atau “Pergerakan Republik Kelima” pada bulan Juli 1998. Deklarasi MVR menyatakan: “Misinya adalah untuk mengamankan umat manusia dalam komunitas nasional, memuaskan aspirasi individu dan kolektif rakyat Venezuela, dan menjamin kondisi kemakmuran yang optimal bagi bangsa.” Partai AD dan COPEI berebut untuk mengusung kandidat. Hugo Chavez menang dengan persentase suara mencapai 56%. Pada tanggal 2 Februari 1999 Hugo Chavez dilantik menjadi Presiden Venezuela (Soyomukti, 2007: 80).

Pada saat Hugo Chavez terpilih sebagai Presiden, Venezuela belum terbebas dari krisis. Bukan hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis politik, sosial, dan budaya. Kemiskinan, tingkat buta huruf yang sangat tinggi, korupsi, diskriminasi terhadap perempuan, dan kapitalisme yang semakin merajalela menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintahan Hugo Chavez. Ia mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Venezuela yang mayoritas hidup dalam garis kemiskinan. Militer pada saat Hugo Chavez berkuasa sebagian besar juga mendukungnya.

Tentara militer generasi Hugo Chavez, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka tidak tumbuh dalam didikan sekolah AS. Para perwira generasi lama dilatih di sebuah pangkalan militer Amerika Serikat. Banyak diantara mereka sepulang ke negerinya menggunakan hasil latihannya untuk menyiksa dan mencegah upaya rakyat yang menuntut demokrasi dan kesejahteraan. Sedangkan sekolah militer generasi Hugo Chavez mempunyai buku-buku kritis tentang sejarah masa lalu dan proses demokratisasi masa kini (Soyomukti, 2008: 84).

Setelah Hugo Chavez berkuasa, rakyat dan militer bersama-sama bekerja bersama untuk membangun Venezuela ke arah yang lebih baik. Setelah memenangkan Pemilu 1998, Hugo Chavez berjanji bahwa ia akan melibatkan rakyat dalam setiap kebijakan yang dilakukannya. Janji tersebut diwujudkan dalam pembuatan konstitusi baru Venezuela dimana konstitusi lama tidak berpihak kepada rakyat miskin. Konstitusi baru mutlak diperlukan sebagai landasan konstitusional bagi kebijakan-kebijakan yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Keterlibatan rakyat dalam pembuatan konstitusi baru dilakukan melalui mekanisme referendum. Hugo Chavez menyatakan bahwa konstitusi lama menunjukkan dimungkinkannya pengambilan keputusan oleh rakyat, seperti dalam yang ditulis oleh Harnecker (2007: 62) :

“Kami membasiskan posisi kami pada pasal 4 konstitusi lama, yang pada dasarnya mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dijalankan dengan memberikan suara melalui lembaga-lembaga kekuasaan publik dan seterusnya. Interpretasi yuridis kami akan pasal itu, adalah memungkinkan bagi Presiden untuk melangsungkan sebuah referendum, sehingga kedaulatan yang di tangan rakyat dapat terwakili dalam lembaga kekuasaan publik.”

Kekuasaan di Venezuela dibagi menjadi lima bagian sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi Bolivarian 1999. Sebagaimana pembagian kekuasaan pada negara pada umumnya, pembagian kekuasaan di Venezuela terbagi pada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun terdapat dua lembaga lain yang mewakili pembagian kekuasaan di Venezuela, yakni Republican Moral Council sebagai Citizen Power dan National Electoral Council sebagai Electoral Power. Meski secara normatif terjadi pembagian kekuasaan politik di Venezuela, akan tetapi dalam praktiknya rezim yang berkuasa di eksekutif bersifat otoriter. Rezim

tersebut dengan didukung oleh militer sering secara sepihak menghakimi lembaga lain yang menghalangi eksekutif sebagai penentang revolusi. Fungsi legislasi tidak berjalan karena mayoritas kursi parlemen diisi oleh orang-orang partai Pemerintah (Stiftung, 2016).

Selain lembaga legislatif, Pemerintah eksekutif juga menguasai lembaga peradilan (yudikatif). Sekitar 66% dari total hakim yang ada di Venezuela merupakan hakim sementara yang bisa diangkat atau diganti oleh Pemerintah Venezuela. Para hakim akhirnya waspada dalam membuat keputusan yang merugikan Pemerintah karena bisa diturunkan sewaktu-waktu. Pemerintah dengan leluasa bisa memberikan hukuman pada setiap pihak yang menentangnya. Sebagai contoh seorang oposisi yang menduduki kursi legislatif, Maria Corina, digulingkan atas tuduhan perencanaan pembunuhan Presiden karena ia secara aktif menentang Pemerintah (Cardenaz, 2018). Contoh lainnya adalah Ricard Mardo yang diturunkan dari jabatannya dengan tuduhan penipuan pajak dan pencucian uang pada tahun 2013, serta masih banyak tokoh-tokoh oposisi lainnya yang diadili secara semena-mena (The Economist, 2013).

Setelah lembaga legislatif dikuasai oleh kelompok oposisi setelah menang dalam pemilu tahun 2015, Pemerintah justru berusaha untuk menghilangkan fungsi badan tersebut dengan membentuk lembaga Konstituante Nasional. Pemerintah melaksanakan pemilu yang nantinya memilih orang-orang yang akan menduduki lembaga baru tersebut. Penempatan posisi di lembaga tersebut menggunakan sistem delegasi dimana masing-masing kota memiliki satu perwakilan, sedangkan ibu kota memiliki dua perwakilan, dan Caracas memiliki tujuh perwakilan. Wewenang dari lembaga tersebut sangatlah besar yaitu mampu merubah konstitusi dan memberhentikan semua aparatur negara (Stiftung, 2016).

Pelaksanaan pemilu tersebut menjadi masalah serius untuk representasi partisan yang menghapus sisa-sisa nilai representasi dan proporsionalitas. Prinsip-prinsip kesetaraan dan universalitas suara yang menjadi prinsip dasar demokrasi telah dilanggar dengan pelaksanaan pemilu tersebut. Proporsi suara politik sangat

berbeda dan tergantung pada tempat pemilih yang tinggal. Daerah pemilihan dengan total 64 persen populasi yang tinggal di 23 kota dan Distrik Federal hanya memiliki kuota 9,72 persen, sedangkan sisanya yang hanya 36 persen dari total populasi mendapat jatah 90,28 persen (McCharty, 2017).

Hasil dari pemilu tersebut semakin menegaskan terkikisnya demokrasi di Venezuela. Seluruh kursi yang ada di majelis tersebut dikuasai oleh koalisi Pemerintah termasuk istri dari Nicolas Maduro. Wewenang yang dimiliki oleh lembaga ini digunakan oleh Pemerintah untuk semakin memperkuat kontrolnya terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Mereka memberhentikan anggota tetap mahkamah agung yang mengeluarkan keputusan tidak sejalan dengan keinginan Pemerintah sehingga semakin terkikis netralitas dari keputusan lembaga peradilan yang ada di Venezuela (McCharty, 2017).

Jauh dari memenuhi komitmen yang dibuatnya selama pembicaraan seperti melepaskan tahanan politik, Pemerintah Maduro terus melecehkan dan secara sewenang-wenang menahan oposisi, termasuk penangkapan dari wakil Majelis Nasional dari partai *Democratic Unity Roundtable (MUD)*, Gilber Caro pada Januari 2017 (Amnesty International, 2017). Aksi-aksi Maduro ini didukung oleh kelompok loyalis fanatik dengan nama *Colectivos*. *Colectivos* adalah organisasi komunitas kiri di Venezuela yang mendukung Nicolás Maduro, Pemerintah Bolivarian, aliansi politik *Great Patriotic Party* atau Kutub Patriotik Besar (GPP) dan partai, Partai Sosialis Persatuan Venezuela (PSUV). *Colectivo* telah menjadi istilah umum bagi kelompok paramiliter bersenjata yang beroperasi di daerah yang dilanda kemiskinan dan menyerang individu, terlibat dalam "pemerasan, penculikan, perdagangan narkoba dan pembunuhan di luar proses hukum dan menyor mereka yang tidak setuju dengan mereka (Kyra G, 2014).

Colectivos muncul pada tahun 1960-an dari perang gerilya di perkotaan Venezuela, dan kembali muncul pada masa kePresidenan Hugo Chavez, ketika menciptakan organisasi induk mereka, yang dikenal sebagai Lingkaran Bolivarian (Stratfor, 2014). Kekuatan *Colectivos* mulai meningkat pada tahun 2002, ketika

Chavez memutuskan ia membutuhkan pasukan keamanan yang independen dari militer untuk menangkal demonstran dari oposisi (InsightCrime, 2018). Chavez menugaskan *Colectivos* sebagai "sayap bersenjata Revolusi Bolivarian" untuk Pemerintah Venezuela, memberi mereka senjata, sistem komunikasi, sepeda motor dan peralatan pengawasan untuk melakukan kontrol di perbukitan Caracas dimana polisi dilarang masuk. Beberapa senjata yang diberikan kepada kelompok-kelompok itu termasuk senapan serbu, senapan mesin ringan dan granat (Elpais, 2014).

Colectivos secara historis selaras dengan politik sayap kiri di Venezuela, dan bertindak sebagai "penegak bagi Pemerintah", bekerja dengan angkatan bersenjata Venezuela dan partai politik yang berkuasa, PSUV. Setiap anggota *colectivo* diharuskan membawa sepuluh orang untuk memberikan suara pada pemilihan selama pemilihan. Seiring waktu, *Colectivos* menjadi lebih bersenjata dan kegiatan kriminal mereka meningkat. Sejumlah kecil kelompok mempertahankan fungsi komunitas dan budaya, dan kebanyakan adalah "geng kriminal dengan kontrol sosial yang besar", yang "bekerja bersama pasukan keamanan, sering melakukan pekerjaan kotor mereka untuk mereka" (Markovits M., Rueda M. 2013).

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menggambarkan *Colectivos* sebagai "kelompok bersenjata pro-Pemerintah" yang "memutuskan siapa yang menerima bantuan Pemerintah dan melakukan kegiatan pengawasan dan intelijen untuk pihak berwenang dan telah mengintimidasi, mengancam dan menyerang orang yang dianggap sebagai menentang Pemerintah " tindakan mereka sebagai terorisme yang disponsori negara (Kyra, G, 2014). Dalam kepemimpinan Nicolas Maduro juga menunjuk seorang wakil Presiden garis keras, Tareck el Aissami, mantan gubernur negara bagian Aragua dan gembong narkoba Amerika Serikat, pada bulan Januari 2017. El Aissami telah diberi otoritas keamanan nasional yang besar, termasuk memimpin perintah "anti-kudeta" yang baru (Rosati, 2017).

Kelompok hak asasi manusia Venezuela, Foro Penal Venezolano, saat ini memiliki daftar lebih dari 252 tahanan politik di Venezuela pada bulan Agustus 2018, termasuk Leopoldo López, metropolitan Caracas Walikota Antonio Ledezma (di bawah tahanan rumah) dan Daniel Ceballos, mantan walikota San Cristóbal di Negara Bagian Táchira (Foro Penal, 2018). Jumlah tahanan politik yang ditahan relatif konstan dari tahun 2014 hingga tahun 2016, tetapi jumlah total penangkapan politik yang dilakukan pada tahun 2014 hingga tahun 2016 melebihi 6.800 (Foro Penal, 2018).

Pada awal tahun 2017, oposisi politik di Venezuela telah terpecah belah. Pemimpin MUD menghadapi lingkungan dimana protes populer, yang sering terjadi antara tahun 2014 dan musim gugur tahun 2016, telah hilang karena kekhawatiran tentang tindakan keras Pemerintah, kekecewaan setelah tuntutan pemilihan ulang gagal, dan kebutuhan masyarakat untuk mencurahkan waktu untuk mencari makanan dan persediaan dasar (CRS Report, 2017).

Selain membatasi kebebasan berkumpul, Pemerintah Venezuela telah menindak keras media dan jurnalis, termasuk media asing. Para pengamat memperkirakan bahwa koalisi MUD akan muncul lebih lemah dari proses registrasi ulang yang diamanatkan oleh *National Electoral Council* (CNE) untuk semua pihak yang mendapat jaminan kurang dari 1 % suara populer di setidaknya 12 negara bagian dalam pemilihan legislatif bulan Desember 2015. Proses itu, yang dimulai pada bulan Maret 2017, penuh dengan kesulitan logistik dan dapat menyebabkan semua partai oposisi terbesar tidak bisa mendaftarkan diri (CRS Report, 2017).

Pada tanggal 30 Maret 2017, didukung oleh dukungan internasional, MUD telah mengadakan protes besar-besaran dan berkelanjutan, beberapa di antaranya telah dipenuhi dengan represi oleh pasukan Pemerintah Venezuela (termasuk Garda Nasional) dan milisi sipil yang bersekutu (CRS Report, 2017). Protes meningkat setelah ketua pengawas kantor diumumkan pada 7 April 2017, bahwa Henrique Capriles, gubernur Miranda yang kalah tipis dalam pemilihan Presiden

tahun 2013, dilarang mencari kantor selama 15 tahun karena "ketidakberesan administratif" di Pemerintah negara bagian. Jaksa agung Venezuela dan banyak pengamat domestik dan internasional prihatin tentang bentrokan yang berlangsung terus menerus antara demonstran dan pasukan Pemerintah Venezuela, yang telah mengklaim 26 jiwa dan mengakibatkan 1.300 penahanan pada 26 April 2017 (Sanchez, 2017). Sejak akhir bulan April, setidaknya 11 kematian telah terjadi (Cawthorne, 2017).

2.2 Sistem Ekonomi

Selama beberapa dekade, Venezuela adalah salah satu negara paling makmur di Amerika Selatan, tetapi sekarang tertinggal di belakang ekonomi penting lainnya di kawasan ini. Venezuela menganut sistem ekonomi campuran, dengan orientasi dalam negeri erat pada paham sosialis (yang juga sebagai paham politik) namun diiringi dengan kegiatan ekspor-impor yang berjalan. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dan ekonominya dibangun di atas minyak (The Economist, 2017). Minyak menyumbang lebih dari 90% ekspor Venezuela dan penjualan minyak mendanai anggaran Pemerintah. Ekspor minyak juga menyediakan negara dengan valuta asing yang dibutuhkan untuk mengimpor barang-barang konsumsi. Salah satu program penting Hugo Chavez setelah berkuasa adalah menasionalisasi perusahaan minyak negara Venezuela, *Petroleos de Venezuela* (Selanjutnya disingkat PDVSA), yang awalnya dikuasai oleh konglomerat swasta.

Selanjutnya pengelolaan perusahaan minyak tersebut dikerjakan oleh kaum buruh. PDVSA merupakan perusahaan minyak terbesar dan paling banyak mempekerjakan buruh. Produksi minyak mentah sekitar 3 juta barrel dan 75%-nya diekspor. Pendapatan devisa dari hasil ekspor minyak berkisar antara 3-4 miliar US dollar per tahunnya. Venezuela sendiri merupakan anggota OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) yang menjadi eksportir minyak terbesar kelima di dunia dan 13% kebutuhan minyak Amerika Serikat tiap harinya dipasok dari negara ini. Kontrol terhadap PDVSA berarti bukan hanya

kontrol terhadap keuntungan Venezuela tetapi juga kontrol terhadap pasar minyak dunia (Soyomukti, 2007: 110). Nasionalisasi terhadap PDVSA membuat pendapatan negara dari sektor minyak dapat sepenuhnya dikelola oleh negara. Pendapatan dari sektor ini digunakan untuk membiayai program-program untuk rakyat, meskipun akhirnya tingkat korupsi juga naik tajam hingga menempati urutan ke-85 dunia dalam tingkat korupsi di tahun 2011 yang merupakan tahun-tahun yang menuju berakhirnya kepemimpinan Hugo Chavez (Transparency International Venezuela, 2011).

Setelah bertahun-tahun kesalahan pengaturan perekonomian di bawah Presiden Hugo Chavez, Venezuela tidak dipersiapkan dengan baik untuk menahan penurunan tajam harga minyak pada tahun 2014. Kondisi ekonomi telah memburuk dengan cepat di bawah Presiden Nicolas Maduro. Pada bulan November 2017, situasi fiskal Pemerintah yang semakin mengerikan memuncak, karena Pemerintah mengumumkan akan berusaha untuk merestrukturisasi utangnya. Venezuela mendapat manfaat dari ledakan harga minyak selama tahun 2000-an. Ketika Hugo Chavez mulai berkuasa pada tahun 1999, harga minyak \$ 10 per barel. Harga minyak terus naik selama beberapa tahun berikutnya, mencapai puncak \$ 133 per barel pada bulan Juli 2008 (CRS Report, 2017).

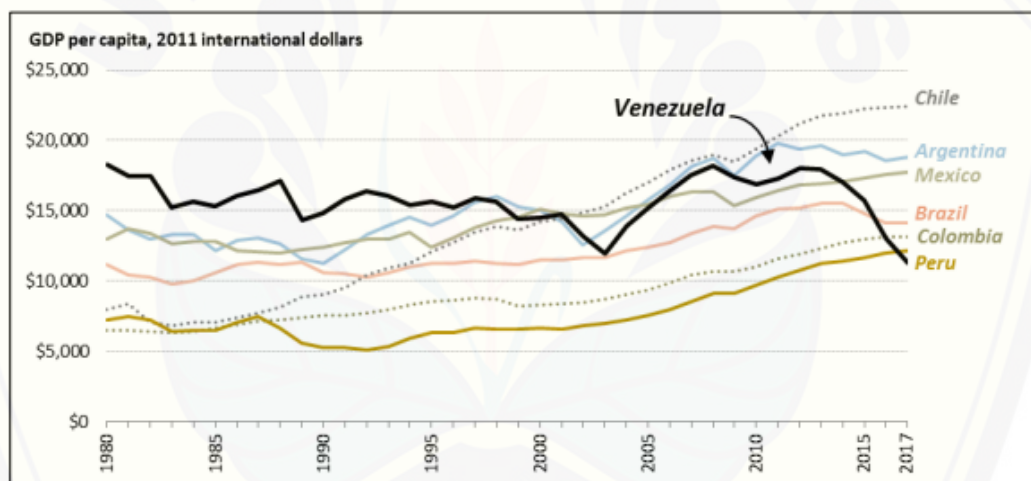
Antara tahun 1999 dan tahun 2015, Pemerintah Venezuela memperoleh hampir \$ 900 miliar dari ekspor minyak bumi, dengan sekitar setengah (\$ 450 miliar) yang diperoleh antara tahun 2007 dan tahun 2012 yakni periode kedua Chavez (McCharty, 2017b). Pertengahan tahun 2011, Hugo Chavez menderita kanker. Sejak saat itu, ia harus menghabiskan segenap waktu dan tenaganya untuk menjalani pengobatan hingga pada tanggal 15 Maret 2013, Hugo Chavez wafat. Ketika Venezuela masih dalam proses peralihan kekuasaan, harga minyak bumi terjun bebas tahun 2014. Otomatis laba PDVSA juga ikut terjun bebas, yang artinya penghasilan negara menurun drastis. Akibatnya semua sektor industri yang selama ini bertumpu mengandalkan sokongan dana dari Pemerintah Venezuela, runtuh kehilangan pegangan ekonomi.

Penerus Hugo Chavez, yakni Nicolas Maduro pun harus menghadapi kekacauan ini. Maduro meneruskan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Hugo Chavez. Padahal kebijakan-kebijakan Hugo Chavez untuk mensubsidi rakyat, menasionalisasikan sektor swasta, serta mengandalkan satu sektor industri (minyak bumi) adalah bom waktu ekonomi. Pemerintah Venezuela mengalami defisit yang sangat besar. Defisit ini dapat diatasi dengan berhutang, namun dengan anjloknya harga minyak dan sosok Nicolas Maduro yang tidak meyakinkan, maka tidak ada yang berani meminjamkan uang pada Venezuela. Nicolas Maduro terpaksa menutup defisit dengan kesalahan yang sangat fatal:, yakni mencetak uang bolivar sebanyak-banyaknya, dan lagi-lagi, hal ini juga menyebabkan Hiperinflasi.

Hiperinflasi atau inflasi tinggi di luar batas kewajaran terus menggerogoti perekonomian Venezuela, menyebabkan industri perdagangan lumpuh, harga-harga barang melambung tinggi, mata uang bolivar jadi tidak berharga sama sekali. Sejak tahun 2014, inflasi mulai meningkat tajam, makin menggila di tahun 2015, dan sudah di luar akal sehat begitu lewat tahun 2016. Bulan Januari 2018, angka inflasi Venezuela sudah mencapai 4000% (dijelaskan pada sub-bab berikutnya). Akibatnya, semua kebijakan ekonomi Hugo Chavez berlandaskan “kebaikan” untuk mensejahterakan rakyat malah berbalik menjadi senjata makan tuan. Kemiskinan dan kelaparan melonjak tinggi. Harga barang yang terus naik membuat semua orang berupaya menimbun bahan pokok. Ironisnya, produksi minyak PDVSA yang selama ini menjadi andalan utama mereka terus menurun, sampai-sampai Venezuela harus mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri Venezuela.

2.3 Krisis Ekonomi

Selama beberapa dekade Venezuela merupakan negara paling makmur di Amerika Selatan, tetapi sekarang Venezuela sekarang tertinggal di belakang di kawasan Amerika Selatan (Gambar 2.1). *Shock* penurunan harga pada tahun 1980 an tidak menjadi pembelajaran bagi Presiden Hugo Chavez, akibatnya penurunan tajam harga minyak pada tahun 2014 memiliki dampak yang cukup signifikan pada perekonomian Venezuela karena tidak adanya penahanan akan adanya *shock* harga minyak. Kondisi ekonomi mengalami keterpurukan dengan cepat di bawah Presiden Nicolas Maduro, kondisi ini diperparah karena pada bulan November 2017 Pemerintah mengumumkan akan adanya restrukturisasi utang Pemerintah.

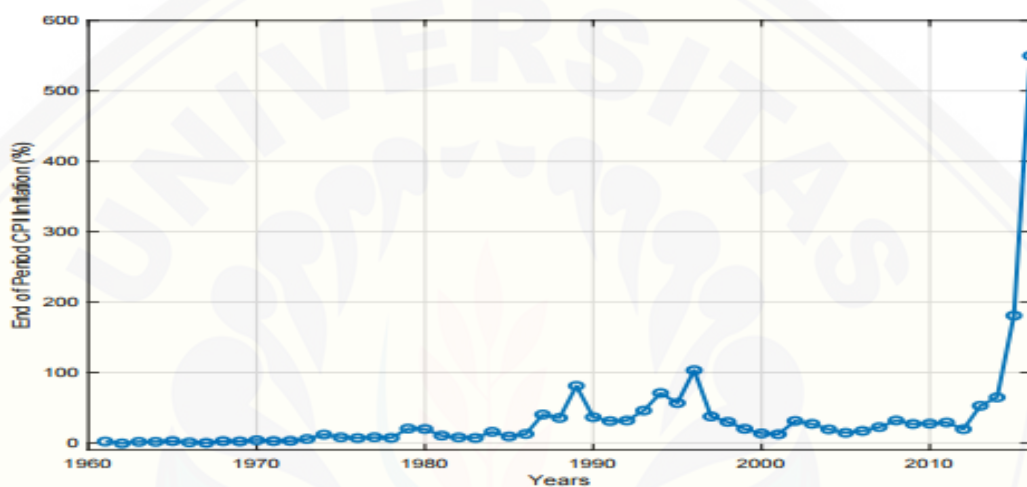


Gambar 2.1 GDP per Kapita Venezuela

Sumber: Nelson, Rebecca. 2018. Venezuela's Economics Crisis: Issues For Congress. Congressional Research Service Report 7-5700. <https://fas.org/sgp/crs/row/R45072.pdf> diakses pada 5 Desember 2018

Kondisi inflasi di Venezuela juga memprihatinkan yang mencapai rata-rata sekitar ratusan persen (Gambar 2.1). Kondisi ini membuat inflasi Venezuela dikategorikan sebagai hiperinflasi. Istilah ini berarti kenaikan harga konsumen mencapai 50 persen dalam sebulan. International Monetary Fund (IMF) memprediksi bahwa inflasi Venezuela mencapai 13.000 persen pada tahun 2018. Salah satu penyebab hiperinflasi ini adalah rendahnya harga minyak dunia,

penurunan produksi minyak, dan kesalahan pengelolaan ekonomi yang membebani Pemerintah Venezuela. Selain itu, nilai tukar mata uang bolivar (mata uang Venezuela) melemah terhadap dolar Amerika Serikat sejak awal 2016. Kebijakan penggantian uang kertas 100 bolivar dengan uang kertas lainnya, ini belum cukup karena produksi barang telah anjlok dan biaya impor dalam mata uang lokal telah meroket, sehingga kombinasi ini yang membuat konsumen tidak bisa mengimbangi peningkatan harga.



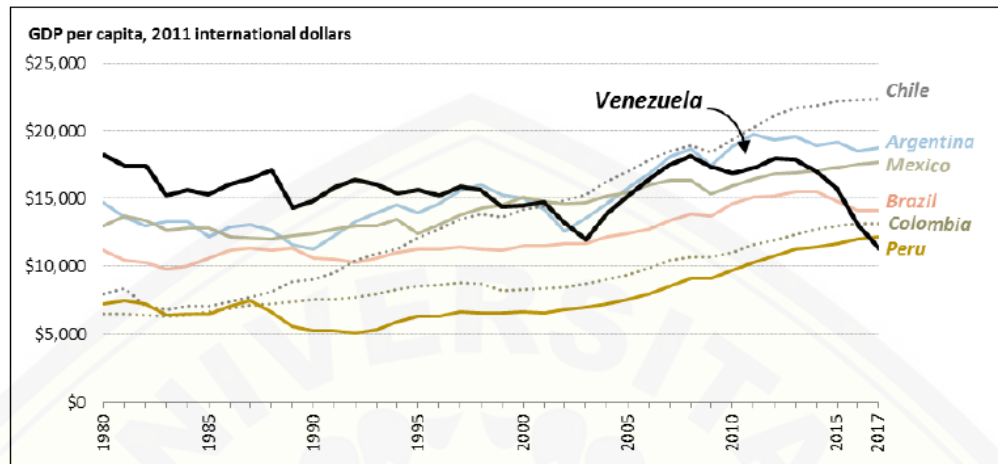
Gambar 2.2 Tingkat Inflasi Tahunan (%)

(Sumber: Restuccia, Diego. 2018. The Monetary and Fiscal History of Venezuela 1960- 2016. MFHLA paper. https://www.economics.utoronto.ca/diegor/research/MFHLA_paper.pdf diakses pada 5 Desember 2018.)

2.3.1 Kesalahan Manajemen Ekonomi Selama Ledakan Harga Minyak

Venezuela mendapat manfaat dari ledakan harga minyak selama tahun 2000-an. Saat Presiden Hugo Chavez mulai berkuasa pada tahun 1999 harga minyak mencapai \$10 per barel. Harga minyak terus mengalami kenaikan selama tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai \$133 per barel pada Juli 2008. Dalam aktivitas perdagangan internasional antara tahun 1999 hingga tahun 2015 memperoleh hampir \$ 900 miliar dari ekspor minyak bumi dan setengahnya (\$450 miliar) diperoleh antara tahun 2007 dan tahun 2012. Hubungan antara peningkatan harga minyak di Venezuela ini selalu linier dengan GDP riil/ kapital

(Gambar 2.3.). Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang sangat tinggi terhadap minyak pada perekonomian Venezuela.



Gambar 2.3 GDP Per Kapita Venezuela dengan Dolar Internasional Tahun 2011

(Sumber: Nelson, Rebecca. 2018. Venezuela's Economics Crisis: Issues For Congress. Congressional Research Service Report 7-5700. <https://fas.org/sgp/crs/row/R45072.pdf> diakses pada 5 Desember 2018 Halaman: 6)

Presiden Hugo Chavez menggunakan dampak dari penjualan minyak untuk menghabiskan banyak dana untuk program sosial dan memperluas subsidi untuk makanan dan energi. Pengeluaran sosial sebagai bagian dari PDB meningkat dari 28 persen menjadi antara 40 persen antara tahun 2000 dan tahun 2013 peningkatan yang jauh lebih besar daripada di ekonomi pasar lainnya di Amerika Latin (Nelson R, 2018: 6). Kebijakan Presiden Hugo Chavez meminjam ekspor minyak di masa depan demi menjalankan defisit anggaran selama masa jabatannya (1999-2013). Penambahan utang publik membuat total utang Venezuela lebih dari dua kali lipat, yakni 28 persen dari tahun 2000 menjadi 58 persen pada tahun 2012, dalam GDP Per Kapita yakni sekitar 13,000\$ di tahun 2000, menjadi sekitar 18.000\$ di tahun 2012 (Nelson R, 2018: 6, lihat Gambar 2.3). Presiden Hugo Chavez juga menggunakan minyak untuk memperluas pengaruh luar negeri (*PetroCaribe*) atau suatu program yang memungkinkan negara- negara Karibia untuk membeli minyak di bawah harga pasar.

Pengambilalihan dan nasionalisasi secara luas pada Pemerintahan Hugo Chavez membuat jumlah perusahaan swasta turun dari 14.000 pada tahun 1998 menjadi 9.000 pada tahun 2011. Belanja Pemerintah Venezuela pada program-program sosial membantu penurunan tingkat kemiskinan di Venezuela dari 37 persen pada tahun 2005 menjadi 25 persen pada tahun 2012. Namun dampak ekonomi yang tersebar luas yang memiliki konsekuensi jangka panjang, dimana pengeluaran Pemerintah Venezuela tidak diarahkan pada investasi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Program nasionalisasi Venezuela menurunkan investasi asing di negara tersebut, yang sebetulnya investasi asing dapat digunakan untuk peningkatan skill dan modal. Selain itu, kontrol harga yang dilakukan Pemerintah Venezuela juga berdampak pada distorsi pasar dan menghambat sektor swasta. Hal ini yang membuat Venezuela tertinggal dalam hal pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan.

Saat pergantian Presiden yakni Nicolas Maduro menjabat, ia mewarisi kebijakan ekonomi yang secara luas dipandang tidak berkelanjutan dan terlalu tergantung pada hasil ekspor minyak. Ketika harga minyak jatuh pada tahun 2014 Pemerintahan Maduro tidak siap untuk menghadapi krisis. Sejak Pemerintahan sebelumnya, yakni Hugo Chaves tidak menciptakan dana stabilisasi seperti itu untuk menjaga terhadap potensi penurunan minyak di masa depan. Sebaliknya, Hugo Chaves melakukan kebijakan meminjam dengan spekulasi harga minyak akan tetap tinggi.

Penurunan drastis harga minyak menyebabkan penurunan tajam dalam pendapatan Pemerintah ditambah dengan pilihan kebijakan Pemerintah memicu krisis ekonomi yang luas. Perekonomian Venezuela diperkirakan telah mengalami kontraksi hampir 35% antara tahun 2012 dan tahun 2017. Pada saat harga minyak jatuh, alih-alih menyesuaikan kebijakan fiskal melalui kenaikan pajak dan pemotongan belanja, Pemerintah Nicolas Maduro berusaha mengatasi defisit anggaran yang semakin meningkat dengan mencetak uang yang menyebabkan terjadinya hiperinflasi. Pemerintah Venezuela telah mencoba untuk mengekang

inflasi melalui kontrol harga meskipun kontrol ini sebagian besar tidak efektif dalam membatasi harga karena pasokan telah mengering dan transaksi telah pindah ke pasar gelap.

Pengangguran di Venezuela diperkirakan mencapai 26% pada tahun 2017 lebih dari tiga kali lipat tingkat pengangguran pada tahun 2012. Tabel 2.1 memberikan gambaran perubahan indikator ekonomi utama untuk Venezuela sejak 2013. Pemerintah Venezuela mengejar berbagai kebijakan untuk mengisi kesenjangan pendanaan dan menghindari kegagalan. Pemerintah mendekati sekutu China dan Rusia untuk membiayai dan mengamankan pinjaman untuk dibayar kembali melalui ekspor minyak masa depan (“*oil-for-loan*” deals).

Pada bulan Mei 2017 bank sentral Venezuela mengumpulkan dana melalui penjualan \$2,8 miliar dalam obligasi PdVSA kepada *Goldman Sachs Asset Management* dengan diskon tajam (Goldman hanya membayar \$865 juta) (Nelson R, 2018: 8). Kesepakatan itu menjadi kontroversi. Akibatnya Pemerintah Venezuela mengalami kesulitan menemukan pembeli untuk transaksi serupa dalam bulan-bulan berikutnya. Pemerintah Venezuela kehabisan cadangan devisa untuk melakukan pembayaran utang dengan cadangan turun dari \$ 21,5 miliar pada akhir tahun 2013 menjadi \$ 10 miliar pada kuartal ketiga tahun 2017. Pada bulan Agustus 2017 sanksi baru Amerika Serikat memperburuk posisi fiskal Pemerintah yang genting. Secara khusus, sanksi pada bulan Agustus 2017 membatasi kemampuan Venezuela untuk meminjam dari investor Amerika Serikat atau mengakses pasar keuangan Amerika Serikat (Nelson R, 2018: 8).

Tabel 2.1 Krisis Ekonomi Venezuela: Indikator Kunci

Indicator	Pre-Economic Crisis (2013)	Latest Data (*2016 or **2017 Forecasted)	% Change
Exports of goods	\$82.7 billion	\$27.0 billion*	-67%
Imports of goods	\$62.9 billion	\$21.4 billion*	-66%
GDP, constant prices, Venezuela's national currency, the bolívar	62.2 billion bolívares	41.2 billion bolívares**	-34%
GDP per capita ^a	\$17,980	\$11,290**	-37%
Inflation, % change in prices ^b	57%	1,133%**	1,888%
Unemployment, % of population	7.5%	26.4%**	252%
Government deficit, % of GDP	14.1%	18.5%**	31%
Government reserves	\$21.5 billion	\$10.0 billion ^c	-53%

(Sumber: Restuccia, Diego. 2018. The Monetary and Fiscal History of Venezuela 1960- 2016. MFHLA papper. https://www.economics.utoronto.ca/diegor/research/MFHLA_paper.pdf diakses pada 5 Desember 2018.)

Dari tabel diatas, memperlihatkan berbagai indikator yang dapat memperlihatkan kerugian yang dialami oleh Venezuela, tahun 2013 merupakan tahun yang dijadikan perbandingan penghasilan dengan data penghasilan di tahun 2016 hingga 2017. Pada sektor ekspor barang, terjadi penurunan dan kerugian sebesar 67% di tahun 2016, untuk GDP bila dibandingkan dengan tahun 2013, tahun 2016 mengalami kerugian sebesar 34%, di tahun 2017 juga tidak membaik, namun angka kerugian terus membesar hingga 37% dibandingkan tahun 2013 (masa sebelum krisis. Hingga angka inflasi yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 1000 persen di tahun 2018 sangat jauh dibandingkan masa sebelum krisis di tahun 2013 yang masih mencapai 57%. Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa krisis yang dialami oleh Venezuela ini sangatlah besar dan merupakan bencana nasional.

2.3.2 Reaksi dan Dampak Internasional dari Krisis Venezuela

Reaksi internasional dan dampak yang terjadi atas krisis yang menimpa Venezuela cukup beragam. Mengingat Venezuela juga negara penghasil sekaligus eksportir minyak yang besar. Beberapa organisasi internasional dengan Venezuela sebagai pokok pendiri seperti ALBA dan pembuatan program Petrocaribe

mengalami permasalahan sebagai kurang lebih efek dari krisis yang menimpa Venezuela.

a) Dinamika di ALBA saat krisis Venezuela

Pada tahun 2004, Venezuela dan Kuba membentuk aliansi ekonomi yang disebut Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika (*the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America* atau ALBA). Pada tahun 2005, Chavez mendirikan Petrocaribe, sekelompok negara yang mengizinkan anggotanya membeli minyak dari Venezuela dengan harga lebih rendah. Prinsip fundamental dari interaksi ekonomi adalah "saling melengkapi" para anggotanya, ketika kekuatan satu negara mengimbangi kelemahan negara lain. Perlu dicatat bahwa ALBA adalah contoh upaya untuk menyatukan negara-negara Amerika Latin di platform paham kiri dan bukti yang meyakinkan bahwa gagasan kiri di wilayah tersebut masih hidup. Selain itu, aliansi antar negara bagian ini dengan miliknya sendiri, dapat dikatakan, individu dan ideologi asli menyatukan dalam dirinya hampir semua negara, yang dalam satu atau lain cara merupakan pendukung dari "sosialisme abad ke-21" (Lacrus, 2018).

Pada tahun 2017, kehidupan politik di negara-negara Amerika Latin dari "poros kiri" memasuki tahap perkembangan yang baru secara fundamental. masa depan aliansi Bolivarian untuk rakyat Amerika kita juga dipandang "kabur" salah satunya kasus krisis yang menimpa Venezuela. Venezuela, transformasi sosial sekali lagi dipandang sebagai sesuatu yang meragukan, seperti pada tahun-tahun terakhir kePresidenan Hugo Chavez, dan terlebih lagi dalam penyelarasan kekuatan. Kepemimpinan negara saat ini, yang dipimpin oleh Presiden Nicolas Maduro, berusaha memerangi sabotase yang konsisten, kekurangan pangan, krisis energi, tetapi tampaknya tidak berani untuk benar-benar melakukan reformasi, apalagi memperdalamnya secara konsisten.

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mungkin memiliki masa depan sebagai diktator. sejak Nicolas Maduro diproklamasikan sebagai penerus Hugo Chavez pada Desember 2012, ia memiliki peluang terbaik untuk tetap berkuasa,

partai-partai oposisi mengalami masa sulit untuk "menjerumuskan" negara ke dalam krisis politik yang tiada henti, yang ditandai dengan perwakilan mereka sebagai jalan keluar konstitusional yang damai dari krisis sebelumnya melalui pemilihan umum. Saat ini, tampaknya baik Pemerintah maupun partai oposisi merasakan konsekuensi dari krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengakibatkan kematian ratusan warga Venezuela karena kelaparan dan kekurangan setiap hari sejak awal tahun 2014.

Saat ini juga ALBA sedang mengalami masa-masa sulit (Lacrus, 2018). Selain prasyarat politik, tantangan serius bagi aliansi Bolivarian bagi rakyat Amerika adalah komplikasi situasi di "inti" aliansi, terutama dalam kerangka hubungan antara Venezuela dan Kuba (sebagai pendiri utama ALBA). Penurunan harga dunia untuk "emas hitam" memaksa Venezuela mengurangi pasokan minyaknya ke negara-negara yang dipasok. Dengan latar belakang mulai berubah menjadi negara demokratis di kawasan Amerika Latin, pada 2018 aliansi masuk, melewati masa-masa sulit.

b) Sanksi Amerika Serikat dari kepemimpinan Bush hingga Donald Trump

Hugo Chavez, saat dia memimpin, dapat menggunakan keuntungan minyaknya untuk tetap di Amerika Serikat kapanpun dia bisa. Chavez juga menggunakan Amerika Serikat sebagai kambing hitam untuk masalah Venezuela. Chavez juga menuduh Amerika Serikat membantu upaya kudeta terhadap Pemerintahnya pada tahun 2002. Sementara Pemerintahan Bush berusaha menjauhkan diri dari upaya kudeta tersebut, dokumen yang ditemukan pada tahun 2004 menunjukkan bahwa CIA (*Central Intelligence of America*) mengetahui upaya kudeta saat itu. Amerika Serikat juga mengutuk Venezuela karena memenjarakan lawan politik serta konsolidasi kekuasaan rezim Hugo Chavez. Hugo Chavez merebut kendali mahkamah agung negara itu pada tahun 2004. Ia juga meningkatkan kendali atas media lokal, mengeluarkan undang-undang yang menghukum media karena menjalankan konten yang "menyinggung" pejabat publik (Macias A & Imbret F, 2019).

Tetapi hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela tetap dekat karena Amerika Serikat masih merupakan konsumen besar minyak Venezuela. Impor Amerika Serikat untuk minyak mentah dan produk minyak Venezuela rata-rata hampir 600.000 barel per hari dalam 10 bulan pertama tahun 2018 (Macias A & Imbret F, 2019), menurut Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat. Begitu Chavez meninggal pada 2013 dan Maduro mengambil alih, ketegangan mulai meningkat sekali lagi. Maduro, yang bukan pemimpin karismatik Chavez, mengkonsolidasikan kekuasaannya pada 2017 dengan melucuti kekuasaan legislatif yang dipimpin oposisi di negara itu. Pada saat itu, krisis kemanusiaan dan ekonomi besar-besaran telah dimulai.

Ekonomi Venezuela hancur setelah harga minyak mulai ambruk pada akhir 2014. Jatuhnya harga minyak membuat Venezuela sulit untuk terus memberikan subsidi untuk banyak program nasionalnya. Hal ini juga menyebabkan kekurangan besar-besaran makanan dan barang-barang dasar lainnya seperti obat-obatan. Krisis ini telah menyebabkan Pemerintahan Donald Trump memberikan sanksi kepada puluhan warga Venezuela yang terkait dengan rezim Maduro. Situasinya telah memburuk ke titik di mana ada berbagai macam krisis di Venezuela.

Pengamat politik dan kenegaraan asal Amerika, mengkritik situasi Venezuela dibawah kepemimpinan Maduro mengalami “krisis ekonomi besar-besaran, krisis kelembagaan besar-besaran, krisis migrasi besar-besaran, krisis kemanusiaan besar-besaran. Semuanya buruk”. Mengenai pertahanan Amerika, Pentagon, dengan cepat mengkritik penempatan pesawat tempur Rusia ke Venezuela. Pemerintah Venezuela harus fokus pada memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan untuk mengurangi penderitaan rakyatnya dan bukan pada pesawat tempur Rusia (Macias A & Imbret F, 2019).

c) Rusia, sekutu tradisional Venezuela

Dengan segala krisis yang menimpa negara, Venezuela telah menemukan sekutu tradisionalnya yakni Rusia. Rusia bukan hanya teman politik utama

Caracas tetapi juga pemodal ladang minyak negara Amerika Selatan itu. Perusahaan minyak terbesar Rusia, Rosneft, beroperasi di Venezuela dan telah memberikan pinjaman kepada perusahaan minyak milik negara PDVSA (Macias A & Imbret F, 2019). Dalam bentuk dukungan lainnya, Rusia telah memberi Caracas batas kredit untuk membeli senjata Rusia. Dari senapan Kalashnikov hingga pesawat Sukhoi, Kremlin telah menjadi perantara beberapa kesepakatan senjata dengan Venezuela dan di tahun 2019 mengerahkan dua pembom Rusia ke negara itu.

Pada akhir tahun 2018, dua pembom strategis Tu-160 Rusia, yang mampu membawa senjata nuklir, mendarat di Caracas dalam sebuah gerakan yang dirancang untuk menunjukkan dukungan Moskow terhadap rezim sosialis Venezuela. Terlepas dari krisis ekonomi negara, Nicolas Maduro menyambut baik penempatan pesawat Rusia. Sebuah pembom strategis berat Tupolev Tu-160M melakukan penerbangan demonstrasi di lapangan udara Pabrik Penerbangan Gorbunov Kazan (Macias A & Imbret F, 2019).

d) PetroCaribe

Petrocaribe adalah aliansi minyak yang melibatkan 17 negara anggota Karibia yang dibentuk oleh Venezuela di tahun 2005. Pemerintah Venezuela telah mengatakan bahwa mereka berniat untuk menghidupkan kembali program minyak PetroCaribe di tahun 2020. Mekanisme tersebut sebelumnya menawarkan minyak ke negara-negara penerima di Karibia dan Amerika Tengah dengan ketentuan preferensial dan penangguhan terkait dengan pengaturan pembangunan lokal. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengatakan pada upacara penutupan KTT ALBA ketujuh belas yang diadakan di Havana tahun 2019 bahwa itu adalah niat Venezuela untuk "berkomitmen untuk meluncurkan kembali PetroCaribe dengan kekuatan besar pada semester pertama tahun 2020." (The Caribbean Council, 2020)

Pasokan dibawah PetroCaribe ditangguhkan ke sebagian besar negara bagian Karibia pada bulan Juni 2018 akibat anjloknya produksi minyak mentah

Venezuela, tekanan politik Amerika Serikat terhadap Caracas dan negara-negara penerima, serta jatuhnya harga minyak dan gas dunia, semuanya membuatnya lebih menguntungkan untuk membeli minyak di tempat lain.

Kuba, bagaimanapun, terus menerima minyak di bawah elemen terpisah dari program tersebut. Komentar Presiden Nicolas Maduro dibuat dalam konteks komitmen Pemerintahan terhadap ALBA, Bagaimana Venezuela bermaksud meluncurkan kembali PetroCaribe dengan cara yang efektif, menghindari sanksi Amerika Serikat yang ketat yang mempengaruhi transaksi keuangan dan transportasi laut terkait Dolar, atau kemungkinan penyerapannya, masih jauh dari jelas (The Caribbean Council, 2020).

Belum ada rincian tentang apa yang direncanakan atau bagaimana pengaturan baru dapat berfungsi sehubungan dengan sanksi Amerika Serikat yang belum diberikan. Pengumuman itu muncul dengan latar belakang meningkatnya keuangan Amerika Serikat dan tekanan lainnya pada perusahaan minyak milik negara PDVSA, dan tindakan terhadap perusahaan negara ketiga yang mengirimkan minyak dan produk minyak Venezuela ke Kuba. Orang-orang Venezuela, sekitar 2 juta di antaranya sekarang telah melarikan diri ke Kolombia, Brasil, Trinidad, Curacao, Aruba, dan lebih jauh lagi di Amerika menurut badan pengungsi PBB, UNHCR. Pengumuman itu datang sebelum harga minyak melewati angka US \$ 70 per barel pada awal Januari tahun 2020, menyusul pembunuhan jenderal Iran, Qassem Soleimani oleh Administrasi Donald Trump, dan ketidakpastian global berikutnya tentang kemungkinan konflik di Timur Tengah (The Caribbean Council, 2020).

Program PetroCaribe, dalam beberapa tahun terakhir terbukti kontroversial di beberapa negara penerima dan negara di luar kawasan Amerika Latin karena telah menciptakan hutang jangka panjang, memungkinkan pengaruh politik Venezuela di forum internasional, dan bertindak sebagai kendaraan untuk memfasilitasi korupsi. Pemerintah Amerika Serikat sangat kritis pada saat mencari cara menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dan Pemerintahannya melalui

program sanksi. Negara Haiti, klaim korupsi yang terkait dengan PetroCaribe terus berputar-putar di sekitar Presiden negara itu, Jovenel Moïse, dan telah menyebabkan demonstrasi jalanan yang serius selama berbulan-bulan setelah sebuah laporan diterbitkan yang merinci tuduhan bahwa dana yang ditujukan untuk program sosial dan infrastruktur telah terlihat banyak. karena US \$ 2 miliar hilang (The Caribbean Council, 2020).

Pada masa lalu, PetroCaribe telah memasok minyak dengan harga pasar dengan imbalan uang muka 40% dengan saldo dibayar kembali selama 25 tahun dengan bunga 1% dan Pemerintah mendapatkan keuntungan dari penjualan minyak dan produk minyak ke pasar memberikan dorongan tunai langsung untuk keuangan Pemerintah (The Caribbean Council, 2020). Skema ini juga menyediakan skala geser bunga, moratorium pembayaran, pembayaran melalui perdagangan barter, dan pengampunan utang dalam keadaan tertentu.

Ketika harga minyak dunia mencapai puncaknya lebih dari US \$ 100 per barel dan selama krisis keuangan global tahun 2007, PetroCaribe terbukti sangat berharga karena pendapatannya memungkinkan Pemerintah Karibia yang berhutang membiayai program pembangunan sosial dan ekonomi mereka. Namun, ketika harga minyak jatuh, kesalahan pengelolaan ekonomi Venezuela secara keseluruhan, dan ketidakstabilan politik di Venezuela menjadi hal yang biasa, banyak aspek pembangunan yang menguntungkan berhenti, meninggalkan beberapa negara Karibia dengan ketergantungan yang berkelanjutan pada hidrokarbon pada saat tekanan itu untuk pindah ke energi terbarukan.

Dari tujuh belas anggota PetroCaribe, 14 negara anggota berada di Karibia meskipun tingkat keterlibatan mereka bervariasi dengan Jamaika dan Republik Dominika memiliki semuanya kecuali mundur dari pengaturan tersebut. Hanya Barbados dan Trinidad yang bukan anggota, meskipun Trinidad sedang berdiskusi dengan Venezuela tentang pengaturan bagi hasil minyak dan gas. Kuba memiliki pengaturan strategis khusus dengan Venezuela dengan Caracas telah memenuhi, di masa lalu, hingga 80% (The Caribbean Council, 2020). dari kebutuhan

minyaknya berdasarkan perjanjian barter untuk layanan Kuba, yang rinciannya tidak dipublikasikan.

Pada pertemuan ALBA, negara-negara anggota sepakat juga untuk mencoba mengembangkan peran ekonomi organisasi dengan memperkuat Bank ALBA, dan untuk membangun “arsitektur keuangan baru” di antara para anggotanya. Anggota ALBA saat ini termasuk Venezuela, Kuba, Nikaragua, Dominika, Grenada, St Kitts, Antigua, St Vincent, St Lucia, dan Suriname. Haiti, Suriah dan Iran terdaftar sebagai pengamat (The Caribbean Council, 2020).

2.3.3 Tekanan Internasional atas Kepemimpinan Nicolas Maduro

Sejak terjadinya krisis, oposisi Venezuela telah meningkatkan keberanian perlawanannya terhadap Presiden Nicolas Maduro setelah ketua kongres Majelis Nasional Juan Guaido bersumpah dirinya sebagai kepala negara sementara dengan dukungan dari Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin. Sejauh ini, banyak negara telah menyatakan sikapnya terhadap masalah tersebut, berikut adalah ringkasan dukungan negara-negara terhadap para pemimpin saingan.

1. Amerika Serikat :

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengakui Guaido sebagai Presiden Venezuela tidak lama setelah pengumuman tersebut. Langkah itu dengan cepat diikuti oleh pernyataan serupa dari Kanada dan sejumlah Pemerintah Amerika Latin yang cenderung beraliran sayap kanan termasuk Brasil dan Kolombia. Sekretaris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo meminta militer Venezuela untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan semua warga negara Venezuela dan warga negara Amerika Serikat yang ada di negara tersebut. Ia menambahkan mengatakan Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap siapa pun yang membahayakan keselamatan warganya. Menurut Mike Pompeo, Amerika Serikat akan melakukan hubungan diplomatiknya dengan

Venezuela melalui Pemerintahan Presiden sementara Guaido (Kontan.co.id, 2019)

2. UE: Otoritas Venezuela harus menghormati 'hak sipil'

Uni Eropa meminta otoritas Venezuela untuk menghormati "hak-hak sipil, kebebasan, dan keamanan" ketua kongres Juan Guaido tetapi berhenti mengikuti Washington dan mengakuinya sebagai Presiden sementara. Pada bulan Januari 2019, rakyat Venezuela secara besar-besaran menyerukan demokrasi dan kemungkinan untuk dengan bebas menentukan nasib mereka sendiri. Seperti yang dikemukakan presiden Presiden Perancis Emmanuel Macron bahwa rakyat Venezuela memiliki hak untuk berdemonstrasi secara damai, untuk dengan bebas memilih para pemimpinnya dan memutuskan masa depannya, sembari memberi hormat atas keberanian rakyat Venezuela yang bergerak menuju kebebasan dan menyebut kemenangan Nicolas Maduro pada pemilu 2018 ilegal (CGTN, 2019). Seorang juru bicara Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan pemilihan Nicolas Maduro tidak bebas dan tidak adil, dan menyatakan dukungan untuk Guaido sebagai ketua majelis nasional. Pemerintah Jerman mengatakan parlemen Venezuela memiliki "peran khusus" untuk dimainkan dalam mengamankan "masa depan bebas" Venezuela.

3. PBB: Seruan dialog untuk menghentikan krisis

Kepala PBB Antonio Guterres pada tahun 2019 mengimbau dialog untuk menghentikan krisis politik Venezuela yang tidak terkendali, setelah Guaido menyatakan dirinya sebagai Presiden sementara. Pada penyampaian itu dijelaskan bahwa dialog itu mungkin menghindari eskalasi yang akan mengarah pada jenis konflik yang akan menjadi bencana bagi rakyat Venezuela dan kawasan. Pemerintah berdaulat memiliki kemungkinan untuk memutuskan apapun yang mereka inginkan (CGTN, 2019).

4. Negara-negara di Amerika Selatan

Negara-negara Amerika Selatan termasuk Argentina, Brazil, Chili, Colombia, Kosta Rika, Ekuador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay dan Peru telah mendukung Guaido (oposisi dari Pemerintah yang dipimpin oleh Hugo Chavez).

2.3.4 Kehadiran “Petro” dalam Krisis Venezuela

Selain berjuang untuk bertahan dalam ekonomi yang merosot dan korupsi politik yang merajalela, warga Venezuela juga menanggung beban sanksi yang dijatuhkan kepada negara Amerika Latin oleh Amerika Serikat dan negara lain. Pada awal 2019, Alfred de Zayas, pelapor PBB pertama yang mengunjungi Venezuela selama 21 tahun, menggambarkan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terdiri dari "perang ekonomi" (Haig, 2019). Pelapor khusus merekomendasikan agar Pengadilan Kriminal Internasional menyelidiki sanksi yang ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai potensi kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma, dengan alasan bahwa sanksi tersebut ilegal karena kurangnya dukungan dari Dewan Keamanan PBB. Dia menyatakan:

“Sanksi dan blokade ekonomi zaman modern sebanding dengan pengepungan kota pada abad pertengahan. Sanksi abad kedua puluh satu berupaya untuk membuat tidak hanya sebuah kota, tetapi negara-negara berdaulat bertekuk lutut.” (Haig, 2019)

Temuan Zayas didasarkan pada misinya di akhir tahun 2017 ke negara yang menyaksikan pelapor mewawancarai menteri Pemerintah, anggota partai oposisi negara, organisasi non Pemerintah (LSM) yang beroperasi di Venezuela, dan akademisi lokal, aktivis dan pejabat gereja. Kritik terhadap sanksi ekonomi telah digaungkan oleh banyak LSM, menyatakan:

“Kami menilai bahwa salah satu penyebab fundamental dari krisis ekonomi di negara tersebut adalah dampak dari sanksi koersif sepihak yang diterapkan dalam perekonomian, terutama oleh Pemerintah Amerika Serikat.” (Haig, 2019)

Presiden Donald Trump mengancam akan mengintensifkan sanksi yang saat ini dijatuhkan terhadap Venezuela, dengan menyatakan bahwa dia akan "terus menggunakan kekuatan penuh dari kekuatan ekonomi dan diplomatik Amerika Serikat untuk menekankan pemulihan demokrasi Venezuela" sambil mengumumkan dukungan untuk pengakuan Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela pada bulan Januari (Haig, 2019). Dalam upaya untuk menghindari sanksi ekonomi yang dikenakan pada Venezuela, Nicolas Maduro mengumumkan rencana untuk meluncurkan *Cryptocurrency* yang didukung oleh minyak, emas dan cadangan berlian negara selama Desember 2017. Presiden mengklaim bahwa mata uang digital, bernama Petro (PTR), akan memungkinkan negara untuk mengakses "bentuk baru pembiayaan internasional".

Pada awal bulan Januari 2018, Presiden Nicolas Maduro memerintahkan penerbitan 100 juta Petro pertama, mengumumkan bahwa setiap Petro akan dipatok dengan nilai satu barel minyak Venezuela - menyamakan kapitalisasi *Cryptocurrency* dengan sekitar \$ 5,9 miliar. Beberapa hari kemudian, Majelis Nasional yang dikelola oposisi mengkritik Petro, menyebut mata uang digital itu "batal demi hukum". Deputi Parlemen Jorge Millan menggambarkan Petro sebagai penipu, dengan menyatakan: "Ini bukan *Cryptocurrency*, ini adalah penjualan minyak Venezuela ke depan. Itu dibuat khusus untuk korupsi. " Jorge Millan menambahkan bahwa upaya Maduro hanyalah sebuah penipuan jenis baru, yang menyamar sebagai solusi krisis (keuangan). Dengan dasar bahwa Pemerintah yang tidak kompeten ingin mengkompensasi kekurangan produksi minyak dengan barel virtual.

Pada akhir bulan Januari 2018, Maduro mengumumkan bahwa penambangan *Cryptocurrency* adalah aktivitas yang "sangat legal" (Haig, 2019). Presiden juga mengumumkan bahwa warga yang menjadi sasaran selama tindakan keras polisi tahun sebelumnya terhadap operasi pertambangan akan dicabut dakwaan terkait. Pada tanggal 30 Januari 2018, administrasi Maduro menerbitkan *white paper* untuk *Cryptocurrency*. Pada tanggal 8 Februari 2018, Jose Vielma Mora, menteri perdagangan luar negeri dan investasi internasional Venezuela,

mengatakan melalui media yang disponsori negara TeleSur bahwa investor asing akan bersedia untuk melakukan perdagangan dengan imbalan Petro, mengklaim bahwa Polandia, Denmark, Honduras, Norwegia, Kanada, dan Vietnam termasuk di antara mitra dagang yang bersiap menerima mata uang kripto yang kontroversial sebagai alat pembayaran (Haig, 2019).

Venezuela meluncurkan presale untuk Petro pada tanggal 20 Februari 2018. 82,4 juta Petros tersedia untuk ditukar dengan mata uang fiat dan *Cryptocurrency* tertentu. Tiga hari kemudian, media Venezuela mengklaim bahwa presale tersebut telah mengumpulkan \$ 1 miliar. Pada tanggal 24 Februari 2018, Pemerintah Venezuela meluncurkan kursus pelatihan *Cryptocurrency* gratis yang bertujuan untuk meningkatkan literasi mata uang digital bagi warga negara biasa.

BAB 3. CRYPTOCURRENCY DAN DAMPAK YANG DIBAWANYA TERHADAP VENEZUELA

Penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan pada bab pertama, akan menganalisis alasan dibuatnya kebijakan Presiden Nicolas Maduro mengeluarkan mata uang Petro yang tidak lain merupakan *Cryptocurrency*. Sebagai suatu hal yang masih baru, *Cryptocurrency* dengan cepat menjadi sorotan dunia, dari praktisi teknologi, finansial hingga pembuat kebijakan. Setelah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang proses masuknya *Cryptocurrency* di Venezuela hingga lahir kebijakan untuk mengeluarkan *Cryptocurrency* secara resmi oleh Pemerintah Venezuela, tentu belum cukup data untuk melakukan kajian yang mendalam. Maka dari itu pada bab ini menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan *Cryptocurrency* itu sendiri, mulai dari sejarah kemunculannya, sistem dan mekanismenya, kebaikan dan keburukan yang melekat pada *Cryptocurrency*, serta bagaimana kebijakan-kebijakan dibuat oleh berbagai negara terhadap *Cryptocurrency*.

3.1 Sejarah *Cryptocurrency*

Kegaduhan yang ditimbulkan oleh *Cryptocurrency* dalam beberapa tahun terakhir sungguh luar biasa. Sebagai suatu hal yang baru ia sangat fenomenal. Kehadirannya bahkan mengganggu sistem keuangan yang telah ada lebih dulu yang bahkan telah berabad-abad bertahan tanpa perubahan yang fundamental. Namun sebenarnya *Cryptocurrency* bukan hanya fenomena kontemporer abad ke-21. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa *Cryptocurrency* terkait dengan gagasan yang diusung oleh kelompok *cypherpunk* (Wijaya, 2017). Hal ini diasumsikan dari gagasan yang disampaikan Satoshi Nakamoto dalam *whitepaper* bitcoin yang tak jauh berbeda dari pemikiran kelompok *cypherpunk*, yakni menentang pengekangan Pemerintah dalam pasar melalui kebijakan-kebijakannya. Salah satu pengekangan muncul dari penggunaan mata uang fiat yang sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah dan bank sentral. Maka dari itu diperlukan

sebuah mata uang baru yang secara ideal terbebas dari intervensi Pemerintah, Bitcoin merupakan perwujudan pertama dari gagasan ini yang berhasil.

Apabila ditarik lebih jauh ke belakang, menurut Martucci (2017) secara teknis, pondasi *Cryptocurrency* dibangun sejak tahun 1980-an ketika seorang *cryptographer* asal Amerika Serikat, David Chaum, menyusun suatu algoritma yang disebut *blinding-algorithm*. Sampai saat ini algoritma tersebut masih menjadi bagian pokok dalam dunia enkripsi. Setelah konsepnya dikomersilkan, mulai bermunculan berbagai mata uang digital yang mencoba menerapkan konsep tersebut seperti DigiCash pada tahun 1980-an, b-money dan Bit Gold pada tahun 1990-an, serta e-gold pada tahun 1990-an. Karena sama-sama menggunakan kriptografi dan bertujuan untuk digunakan sebagai media pertukaran, mereka juga disebut sebagai *Cryptocurrency*. Namun semuanya kandas seiring berjalannya waktu sehingga belum secara publik digunakan dalam ekonomi pasar. Permasalahannya beragam, seperti kurangnya investasi yang menyokongnya, secara keamanan masih sangat lemah, atau penggunaannya yang sangat terbatas (Wulf C, 2018).

Pada tahun 2008 dunia mengalami krisis ekonomi yang cukup berat. Kekecewaan terhadap Pemerintah-Pemerintah serta bank-bank sentral cukup kuat. Tidak heran apabila gagasan-gagasan yang menentang campur tangan otoritas sentral dalam praktik ekonomi mulai bermunculan kembali. Lalu muncul seorang programer dengan nama alias Satoshi Nakamoto yang mempublikasikan *whitepaper* dari Bitcoin pada akhir tahun 2008. Dalam berbagai forum online, mulai banyak yang tertarik dengan gagasan yang ditawarkan Nakamoto. Sampai pada akhirnya sistem Bitcoin mulai berjalan sejak tanggal 3 Januari 2009 di saat blok pertama (*genesis block*) Bitcoin tercipta.

Hingga saat ini identitas Satoshi Nakamoto belum terungkap dan mungkin tidak akan pernah bisa diungkap. Bitcoin yang merupakan karya besarnya menerapkan sistem desentralisasi. Satoshi Nakamoto sendiri sebagai penemu tidak memiliki otoritas untuk mengendalikan secara penuh sistem Bitcoin. Seiring

banyaknya pihak yang terlibat dalam mengembangkan Bitcoin, Satoshi Nakamoto akhirnya memutuskan untuk sepenuhnya menghilang. Tidak ada jejak apapun dari Satoshi Nakamoto. Meski demikian ia tetap dianggap sebagai bapak *Cryptocurrency* modern, karena jasanya telah membuka cakrawala pengembangan *Cryptocurrency* yang hingga saat ini telah melahirkan ribuan alternatif selain bitcoin.

Bitcoin dianggap sebagai *Cryptocurrency* modern pertama yang secara publik digunakan secara publik sebagai media pertukaran. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2010 Bitcoin memiliki nilai, yakni terjadinya transaksi pembelian dua pizza seharga 10 ribu bitcoin (Cove, 2017). Seiring penggunaannya yang semakin meluas, nilai Bitcoin terus naik. Jika kita sandingkan Bitcoin pada U.S. dollar, pada bulan Desember 2017 kita membutuhkan 18 ribu U.S. dolar untuk bisa memiliki 1 bitcoin. Harga yang sangat mahal jika dibandingkan pada bulan Maret 2010 ketika 1 bitcoin masih seharga 0,003 U.S. dollar (Durden, 2017).

Meski mengalami kenaikan harga yang meroket luar biasa, bukan berarti Bitcoin tidak pernah mengalami penurunan harga. Bahkan bisa dikatakan harga Bitcoin sangat volatil. Karena nilai (harga) yang dimiliki Bitcoin tidak lain ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar dimana permintaan dan penawaran menjadi intinya. Maka dari itu banyak pihak menyebut Bitcoin sebagai *bubbles* yang sewaktu-waktu bisa meletus. Dalam hitungan jam saja perubahan harga bitcoin bisa sangat tajam.

Konsekuensi *Cryptocurrency* yang paling banyak dibahas dan dikenal luas adalah volatilitas *Cryptocurrency*. Volatilitas mengacu pada perilaku harga sekuritas dan fluktuasi yang terjadi dalam jangka pendek. Bitcoin, misalnya, sangat tidak stabil karena harga per koinnya mulai dari \$1.000 pada awal tahun 2017 dan berakhir di tahun 2017 pada titik tertinggi sepanjang masa sebesar \$19.843, peningkatan nilai lebih dari 1.300% (Kleinman, 2018). Hal ini yang membuat banyak orang berinvestasi dengan membeli Bitcoin untuk alasan yang bersifat spekulatif. Namun di saat yang lain harga Bitcoin bisa turun drastis,

sebagai contoh pada tanggal 22 Desember 2017 secara tajam nilai Bitcoin anjlok 21% hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, dari 15.561 U.S. dollar menjadi 12.504 U.S. dollar (Kleinman, 2018). Volatilitas yang dialami Bitcoin juga terjadi pada hampir semua *Cryptocurrency* lainnya.

Berbicara tentang *Cryptocurrency* selain Bitcoin, umumnya mereka disebut Altcoin (*alternative coin*). Hingga saat ini terhitung lebih dari 1600 Altcoin yang beredar dan digunakan di dunia (Bos, 2018). Sistem Bitcoin bersifat *open source*, sehingga siapapun bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan *Cryptocurrency* versinya sendiri. Namun dari sekian banyaknya proyek *Cryptocurrency* baru sebagai alternatif, mayoritas gagal. Bahkan setidaknya dalam tahun 2016 saja terdapat 26.000 proyek baru (Bos, 2018). Kompetisi terjadi dalam upaya mewujudkan proyek-proyek *Cryptocurrency* baru, sehingga bisa dikatakan bahwa 1.600 *Cryptocurrency* yang ada saat ini merupakan yang terbaik.

3.2 Sistem dan Mekanisme *Cryptocurrency*

Pada bagian ini menjelaskan mengenai seluk-beluk sistem yang digunakan pada *Cryptocurrency*, serta bagaimana mekanismenya berjalan. Karena Bitcoin merupakan *Cryptocurrency* pertama dan yang paling tinggi nilainya hingga saat ini, serta hampir semua *Cryptocurrency* meniru Bitcoin baik sepenuhnya maupun sebagian, maka penjelasan-penjelasan di bawah akan erat kaitannya dengan sistem dan mekanisme yang lekat pada Bitcoin. Namun secara umum semua *Cryptocurrency* memenuhi kriteria sebagai berikut (Bos, 2018):

1. Bersifat desentralisasi yang menggunakan skema koneksi dan transfer data *peer-to-peer*
2. Memiliki batasan pasti terkait jumlah suplai koin yang beredar
3. Dibangun atas pondasi *public ledger* (lebih banyak dikenal sebagai *blockchain*) atau *database* yang akan mencatat semua transaksi yang terjadi
4. Menggunakan algoritma komputasi seperti *proof of work* yang berguna untuk melakukan verifikasi atas semua transaksi pada *blockchain*. Dalam

kebanyakan *Cryptocurrency* kapasitas untuk melakukannya dimiliki dan disediakan oleh *miner*.

5. Memanfaatkan kriptografi, biasanya berupa *public key* dan *private key*

Selanjutnya, karena *blockchain* merupakan pondasi utama dalam *Cryptocurrency*, perlu dipahami bahwa agar transaksi menggunakan *Cryptocurrency* bisa berlangsung tanpa pihak ketiga, maka perlu adanya teknologi yang bisa secara transparan menggantikan mereka dalam mencatat setiap transaksi yang dilakukan, *blockchain* bisa diumpamakan buku besar pencatatan semua transaksi yang terjadi menggunakan *Cryptocurrency* tersebut. Adapun yang mencatat di buku besar tersebut adalah komputer dengan spesifikasi tertentu yang disebut penambang/*miner*. Sederhananya para *miner* adalah mereka yang menyediakan daya komputasi yang dimiliki untuk memecahkan persoalan matematis untuk menciptakan *block* baru sehingga *blockchain* terus ada serta memvalidasi setiap transaksi yang terjadi lalu mencatatnya dalam *blockchain* tersebut.

Sedangkan kriptografi sebagai salah satu komponen penting dalam *Cryptocurrency* merupakan jaminan keamanan yang dimiliki *Cryptocurrency*. Karena agar jaringan yang meniadakan orang ketiga sebagai media perantara itu bisa aman dan dipercaya, perlu adanya teknologi yang mampu membuat *Cryptocurrency* aman dari serangan pihak tertentu. Selain itu, karena dasar dari kriptografi adalah penghitungan matematis yang rumit maka ia bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi *double-spending* dalam *Cryptocurrency*. Lantas apa yang membedakan dengan mata uang yang saat ini umum digunakan, seperti mata uang Rupiah, yang juga sudah banyak digunakan untuk transaksi secara digital? *Cryptocurrency* memiliki sifat terdesentralisasi, sedangkan model transaksi yang selama ini sering digunakan dalam masyarakat sifatnya tersentralisasi.

Sifat tersentralisasi dicontohkan pada model transaksi yang selama ini sering digunakan oleh masyarakat. Misalnya dalam kasus ini dicontohkan orang tua yang ingin mengirimkan uang kepada anaknya di perantauan, maka yang ia

lakukan adalah menggunakan layanan perbankan (ATM, Mobile Banking, atau datang langsung ke bank terkait) lalu mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening anaknya tersebut. Transaksi tersebut pada dasarnya dilakukan melalui perantara bank dan layanan yang dipercaya. Berikut adalah skema beroperasinya transaksi menggunakan sistem konvensional:



Gambar 3.1 Ilustrasi proses transaksi keuangan yang tersentralisasi

Sumber : Eka, Randi. 2018. Mengenal *Cryptocurrency* dan Mekanisme Transaksinya. Dari dailysocial.id : <https://dailysocial.id/post/mengenal-Cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya> Pada 5 Januari 2020

Orang tua yang ingin mengirimkan uang kepada anaknya di perantauan, maka yang ia lakukan adalah menggunakan layanan perbankan (ATM, Mobile Banking, atau datang langsung ke bank terkait) lalu mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening anaknya tersebut. Transaksi tersebut pada dasarnya dilakukan melalui perantara bank dan layanan yang dipercaya.

Jadi prosesnya uang yang ditransfer sebenarnya masuk ke bank terlebih dulu, lalu diteruskan ke penerima. Prosesnya *real time* sehingga perpindahan tersebut tidak terasa. Namun yang cukup dirasakan justru karena prosesnya melalui perantara, maka ada imbalan yang harus dibayarkan, yakni berupa biaya administrasi, baik yang dikeluarkan saat itu juga (jika mengirimkan ke rekening bank yang berbeda) atau dalam biaya administrasi yang dikenakan setiap bulan.



Gambar 3.2 Ilustrasi proses transaksi keuangan yang terdesentralisasi

(Sumber : Eka, Randi. 2018. Mengenal *Cryptocurrency* dan Mekanisme Transaksinya. Dari dailysocial.id : <https://dailysocial.id/post/mengenal-Cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya> Pada 5 Januari 2020

Sedangkan sifat terdesentralisasi artinya tidak ada yang menjadi penengah atau pihak khusus yang menjadi perantara. Transaksi dilakukan secara *peer-to-peer* dari pengirim ke penerima. Seluruh transaksi dicatat dalam komputer yang berada di jaringan tersebut, di seluruh dunia, atau disebut dengan *miner* (penambang yang ikut membantu mengamankan dan mencatat transaksi di jaringan). *Miner*/penambang akan mendapatkan komisi dengan uang virtual yang digunakan. Para penambang *Cryptocurrency* umumnya menggunakan komputer berspesifikasi tinggi yang dikhususkan hanya untuk menambang. Sifat desentralisasi ini yang menjadi gagasan fundamental bagi sistem Blockchain. Pada dasarnya Blockchain menjadi platform yang memungkinkan mata uang digital *Cryptocurrency* dapat digunakan untuk bertransaksi.

Perbedaan *Cryptocurrency* dengan *fiat money*

<i>Cryptocurrency</i>	<i>Fiat Money</i>
Tidak memiliki otoritas sentral	Memiliki otoritas sentral
Nilai dipengaruhi pasar	Nilai dipengaruhi kebijakan negara
Jumlah yang beredar pasti	Jumlah yang beredar bisa diubah-ubah
Tidak memiliki bentuk fisik	Memiliki bentuk fisik
Tidak dibatasi wilayah teritorial tertentu	Dibatasi wilayah teritorial tertentu
Semua transaksi dicatat secara transparan	Transaksi bisa dilakukan tanpa diketahui orang lain
Kepercayaan dalam melakukan transaksi disandarkan pada teknologinya	Kepercayaan dalam melakukan transaksi disandarkan pada pihak ketiga

Tabel 3.1. Perbedaan *Cryptocurrency* dengan *Fiat Money* (Sumber: digitalis.id)

3.3 Kebaikan dan Keburukan *Cryptocurrency*

Berikut adalah kebaikan dan keburukan *Cryptocurrency*:

Kelebihan	Bisa jadi keduanya	Kekurangan
Terdesentralisasi	Anonim (berguna bagi beberapa pihak, namun sangat merugikan bagi Pemerintah)	Tidak ada sokongan Pemerintah
Transaksi cepat	Pembayaran yang tidak bisa ditarik kembali	Penerapan teknologi yang rumit
Pencatatan yang transparan dan berintegritas (<i>Blockchain</i>)	Masih belum diterima secara luas sebagai metode pembayaran	Digunakan untuk transaksi ilegal
Mampu menjangkau seluruh dunia (selama ada internet)		Memiliki resiko keamanan terhadap peretasan dan penipuan
Diamankan oleh kriptografi		Saat ini masih digunakan dalam hal spekulasi sehingga memiliki nilai yang sangat volatil
Secara teknis tidak ada kegagalan, sehingga bisa terus berlangsung		Biaya listrik dan peralatan yang mahal
Bersifat open source (kebanyakan)		

Tabel 3.2. Kelebihan dan Kekurangan *Cryptocurrency* (Sumber: digitalis.id. 2020. Apa Itu Bitcoin dan Apa Bedanya Dengan Vexanium <https://digitalis.id/blog/apa-itu-bitcoin-beda-dengan-vexanium/>. Pada 28 Desember 2020)

3.4 Regulasi Terhadap *Cryptocurrency*

Perkembangan teknologi yang cepat seringkali tidak bisa diimbangi dengan adanya regulasi yang tepat dari Pemerintah. Berbeda dengan teknologi yang dikembangkan melalui inovasi-inovasi, regulasi dihasilkan dari aktivitas politik. Meskipun secara teknis masing-masing memiliki kerumitannya tersendiri, secara substansi aktivitas politik dipenuhi tarik-menarik kepentingan berbagai pihak. Bagi *Cryptocurrency* yang muncul dari pihak-pihak yang menentang intervensi Pemerintah dalam transaksi ekonomi, memungkinkan penyelewengan penggunaannya untuk kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba dan pencucian

uang. Setidaknya isu-isu terkait resiko atau keburukan dari *Cryptocurrency* ini cukup menarik perhatian Pemerintah untuk membuat regulasi terhadapnya.

Cryptocurrency memang dianggap bermasalah, namun tidak ada yang bisa menampik kenyataan bahwa *blockchain* yang merupakan teknologi fundamentalnya merupakan suatu terobosan yang sangat penting dan bermanfaat. Pengembangan *blockchain* bahkan bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur pelayanan publik seperti pencatatan sipil. *Blockchain* sekarang telah mengalami berbagai pengembangan sejak pertama kemunculannya. Namun perlu ditegaskan bahwa ketika Pemerintah secara terang-terangan menggunakan *blockchain* tentu publik secara tidak langsung akan semakin mengenal *Cryptocurrency*. Maka isu-isu terkait penyelewengan penggunaan *Cryptocurrency* semakin sulit diatasi tanpa adanya regulasi yang memadai.

Terdapat paradoks dalam regulasi *Cryptocurrency*. Kondisi paradoks ini muncul tidak lain karena ketidakpastian yang masih lekat kaitannya dengan *Cryptocurrency*. Secara sederhana paradoks dihadapi Pemerintah karena jika keputusan yang diambil ialah melarang *Cryptocurrency* di negaranya, hasilnya ia mengabaikan kebaikan-kebaikan yang lekat pada *Cryptocurrency*. Namun karena ketegasan tersebut ada penekanan terhadap rasio adopsi sehingga resiko yang lekat pada *Cryptocurrency* bisa diminimalisir. Kebaikan-kebaikan *Cryptocurrency* lebih banyak dirasakan oleh pengguna. Maka penggunaannya yang tidak bisa dikontrol secara langsung oleh Pemerintah memungkinkan para pengguna untuk tetap memanfaatkan *Cryptocurrency* meskipun sudah dilarang. Bahkan bisa jadi semakin banyak yang mengadopsinya karena akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui *Cryptocurrency* melalui larangan yang muncul dari Pemerintah, dengan kata lain resiko-resikonya semakin sulit untuk diatasi (Bos, 2018).

Permasalahan yang ada saat kita membahas regulasi *Cryptocurrency* sangat kompleks dan berlapis-lapis. Perlu dipilah dengan jelas sebelumnya agar bisa dengan mudah dijelaskan bagaimana regulasi *Cryptocurrency* tersebut. Setidaknya lapisan-lapisan tersebut bisa kita bagi menjadi tiga, *logical layer*,

information layer dan *user layer*. Lapisan yang pertama, yaitu *logical layer* merupakan lapisan yang di dalamnya terdapat aturan main *Cryptocurrency* yang secara umum bisa dideskripsikan dengan protokol desentralisasi Bitcoin dan sifat *peer to peer*-nya. *Blockchain* dan berbagai pondasi teknologi yang memungkinkan beroperasinya *Cryptocurrency* juga termasuk dalam lapisan ini. Lapisan kedua (*information layer*) adalah lapisan layanan yang berisikan pihak-pihak penengah (*intermediaries*) yang menjadi jembatan agar *Cryptocurrency* bisa diakses publik melalui aplikasi yang *user friendly*. Sedangkan lapisan ketiga atau *user layer* merupakan lapisan di mana terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan *Cryptocurrency* melalui berbagai cara yang berbeda-beda (Bos, 2018)

Menentukan lapisan yang tepat sebagai sasaran regulasi sangat penting. Salah menentukan lapisan akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Menurut Bos (2018) lapisan yang paling tepat untuk disasar regulasi Pemerintah adalah lapisan kedua/*information layer*. Penengah adalah jembatan utama yang menghubungkan publik dengan teknologi *Cryptocurrency*. Karena tidak semua pihak yang tertarik untuk memanfaatkannya memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengoperasikannya sendiri. Maka pihak penengah ini sangat penting dalam ekosistem *Cryptocurrency* itu sendiri. Selain itu karena mereka adalah profesional, maka Pemerintah akan bisa lebih mudah mengatur mereka dan mengendalikan output dari regulasinya.

Alasan lapisan pertama tidak bisa disasar adalah bahwa mengatur sistem fundamental *Cryptocurrency* dengan standar Pemerintah hampir tidak mungkin. Walaupun dipaksakan akan timbul dampak yang tidak diinginkan. Contoh regulasi yang menysar lapisan pertama adalah membuat *Cryptocurrency* alternatif yang secara resmi dikontrol Pemerintah atau setidaknya mengatur standar sistem yang wajib diterapkan pada setiap *Cryptocurrency*. Karena sifatnya yang *open source* dan terdesentralisasi, maka sulit untuk mengutak-atik sistemnya. Selain itu gagasan yang anti-intervensi Pemerintah semakin kuat nantinya karena terbukti bahwa Pemerintah dengan kepentingannya adalah pihak yang jahat karena ikut campur dan membuat batasan-batasan (Bos, 2018).

Pengguna yang merupakan lapisan ketiga bukanlah lapisan yang tepat untuk dijadikan sebagai sasaran regulasi. Meski tidak ada alasan yang substansial sebagaimana lapisan pertama, tapi masih tidak tepat jika harus memilih di antara ketiga lapisan yang ada. Karena secara teknis pihak-pihak yang memanfaatkan *Cryptocurrency* sangat sulit dijangkau oleh Pemerintah. Selain sulitnya memantau individu-individu yang banyak, juga teknologi *Cryptocurrency* yang mendukung adanya anonimitas pengguna. Sebagai contoh seseorang akan tetap bisa melakukan transaksi jual beli narkoba melalui *Cryptocurrency* meskipun ada regulasi yang melarangnya. Pemerintah tidak bisa menghukum mereka yang melakukan transaksi tersebut kecuali mereka menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya, yang mana tidak mungkin terjadi. Contoh lain adalah pengenaan pajak terhadap jumlah aset *Cryptocurrency* yang dimiliki, karena anonimitas yang ada pada *Cryptocurrency* maka Pemerintah tidak tahu jumlah aset yang pengguna miliki, maka jumlah pajak yang bisa ditarik pun tidak jelas (Bos, 2018).

Apabila Pemerintah menargetkan regulasinya pada lapisan kedua, maka pengguna pun bisa dijangkau lebih mudah. Misalnya suatu exchange mewajibkan para pengguna layanannya untuk melengkapi data dirinya agar nantinya bisa dikenali lebih jauh. Dengan demikian meskipun anonimitas menjadi inti sistem *Cryptocurrency* namun tetap akan diketahui dan dilacak transaksinya. Akses terhadap pencatatan setiap transaksi bersifat publik, karena *blockchain* itu sendiri sebagai *ledger* secara transparan mencatatnya. Bila ditelusuri dengan teliti, pada akhirnya *Cryptocurrency* tidak bisa terhindar dari pihak *exchange* tempat menukarnya dengan *fiat money*. Apabila ada regulasi yang jelas mengenai standarisasi pihak exchange, maka dampak buruk penggunaan *Cryptocurrency* untuk kegiatan ilegal bisa diminimalisir. *Anti Money Laundering* (AML) dan *Know Your Customer* (KYC) telah diadopsi secara luas oleh beberapa negara. Setidaknya langkah ini cukup tepat apabila didasarkan pada *intermediaries*.

3.4.1 Manfaat dan Pro Kontra *Cryptocurrency* di Beberapa Negara

Mata uang digital peer-to-peer Bitcoin memulai debutnya pada tahun 2009 dan dengan itu mengantarkan era baru *Cryptocurrency*. Sementara otoritas pajak, lembaga penegakan hukum, dan regulator di seluruh dunia masih memperdebatkan praktik terbaik Bitcoin tidak diterbitkan, didukung, atau diatur oleh bank sentral mana pun. Sebaliknya, mereka dibuat melalui proses yang dihasilkan komputer yang dikenal sebagai penambangan. Selain menjadi *Cryptocurrency* yang tidak terkait dengan Pemerintah mana pun, Bitcoin adalah sistem pembayaran *peer-to-peer* karena tidak ada dalam bentuk fisik.

Dengan demikian, Bitcoin menawarkan cara yang nyaman untuk melakukan transaksi lintas batas tanpa biaya nilai tukar. Hal ini juga memungkinkan pengguna untuk tetap anonim. Konsumen memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membeli barang dan jasa dengan Bitcoin langsung di pengecer online, menarik uang tunai dari ATM Bitcoin, dan menggunakan Bitcoin di beberapa toko fisik. Meskipun Bitcoin sekilas tampak sebagai sistem mata uang virtual yang mapan, masih belum ada hukum internasional yang mengatur secara seragam (Bajpai P, 2019)

1. China

China tidak mengakui mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah dan sistem perbankan tidak menerima mata uang kripto atau menyediakan layanan yang relevan. Pemerintah China telah mengambil serangkaian langkah regulasi untuk menindak aktivitas yang terkait dengan *Cryptocurrency* untuk tujuan perlindungan investor dan pencegahan risiko keuangan. Langkah-langkah tersebut termasuk mengumumkan bahwa penawaran koin awal ilegal, membatasi bisnis utama platform perdagangan *Cryptocurrency*, dan mencegah penambangan Bitcoin. Sementara itu, bank sentral China dilaporkan mempertimbangkan untuk menerbitkan mata uang digitalnya sendiri.

Pada bulan Januari 2018, Kelompok Remediasi Risiko Keuangan Internet Terkemuka China dilaporkan meminta Pemerintah daerah untuk menghapus kebijakan preferensial yang ada untuk perusahaan pertambangan Bitcoin dalam hal harga listrik, pajak, atau penggunaan lahan, dan memandu keluarnya perusahaan tersebut secara tertib dari bisnis penambangan Bitcoin. Daerah harus mengirimkan laporan rutin tentang operasi penambangan Bitcoin di yurisdiksi mereka. Sejak saat itu peraturan tentang penambangan Bitcoin telah diperkuat, setidaknya di beberapa provinsi di China. Banyak tambang Bitcoin di China telah berhenti beroperasi (Library of Congress, 2018).

2. Perancis

Cryptocurrency sebagian besar tetap tidak diatur di Perancis. Sejauh ini, hanya dua peraturan yang berisi ketentuan tentang teknologi blockchain yang telah dikeluarkan, tetapi penerapannya masih sangat sempit. Namun, Pemerintah telah membentuk beberapa misi pencarian fakta dan secara aktif bekerja untuk membangun kerangka peraturan. Otoritas pengatur Perancis umumnya waspada terhadap *Cryptocurrency*, karena volatilitasnya yang tinggi dan sifatnya yang tidak diatur, tetapi tampak antusias tentang teknologi blockchain yang mendasarinya. Selain itu, otoritas Perancis telah mengeluarkan beberapa panduan terbatas terkait dengan perlakuan pajak mata uang kripto, menginstruksikan bahwa setiap keuntungan dari penjualannya dapat dikenakan pajak, dan nilainya harus diperhitungkan saat menghitung pajak kekayaan (Library of Congress, 2018).

3. Rusia

Bitcoin tidak diatur di Rusia, meskipun penggunaannya sebagai pembayaran barang atau jasa adalah ilegal. Rancangan undang-undang tentang aset keuangan digital diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 20 Januari 2018. RUU tersebut mendefinisikan "penambangan" sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan *Cryptocurrency* dengan tujuan menerima kompensasi dalam bentuk *Cryptocurrency*. Penambangan diperlakukan sebagai kegiatan

kewirausahaan yang dikenai pajak jika penambang melebihi batas konsumsi energi yang ditetapkan Pemerintah selama tiga bulan berturut-turut. Mengenai penawaran koin awal atau ICO (*Initial Coin Offerings*), hanya investor yang memenuhi syarat yang diizinkan untuk berpartisipasi di dalamnya, kecuali untuk kasus yang akan ditentukan oleh Bank Sentral, menurut laporan berita.

Token dan koin diklasifikasikan dalam tagihan sebagai properti dan tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah. RUU tersebut tidak mengizinkan pertukaran mata uang kripto dengan rubel atau mata uang asing. Pertukaran token untuk rubel dan mata uang asing diperbolehkan tetapi hanya melalui operator berlisensi. RUU tersebut juga memberikan definisi "kontrak pintar". Kementerian Telekomunikasi dan Komunikasi Massa telah mempresentasikan konsep rancangan undang-undang tentang aset keuangan digital sendiri. Hal ini merekomendasikan pengenalan istilah "pertambangan industri", mendaftarkan penambang ke kantor pajak, dan menetapkan persyaratan untuk konsumsi energi.

Rusia juga merekomendasikan pembebasan pajak bagi penambang selama dua tahun untuk merangsang aktivitas mereka. Sebelumnya, Kementerian telah menawarkan untuk membuat platform pertukaran khusus bagi para penambang untuk memastikan transparansi pertukaran mata uang kripto. Secara terpisah, amandemen diperkenalkan pada Kode Sipil untuk melindungi hak-hak pemilik koin dan token *Cryptocurrency*. Dokumen tersebut mendefinisikan "uang digital" dan "hak digital", dan memberikan perlindungan yudisial mereka. Penulis mengatakan bahwa peraturan ini akan memungkinkan koin dan token untuk dimasukkan ke dalam harta pailit atau harta orang yang sudah meninggal (Library of Congress, 2018).

4. Inggris

Inggris tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur *Cryptocurrency*, seperti bitcoin, ethereum, litecoin, dll. Gubernur Bank Inggris dilaporkan menyatakan bahwa regulasi *Cryptocurrency* diperlukan. Jalan yang lebih baik adalah dengan mengatur elemen ekosistem aset kripto untuk

memerangi aktivitas terlarang, mempromosikan integritas pasar, dan melindungi keselamatan dan kesehatan sistem keuangan. Peraturan dari Bank of England Act 1998 menetapkan bahwa Bank of England memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan Inggris. Berdasarkan tujuan ini, Bank telah mempertimbangkan risiko *Cryptocurrency* terhadap stabilitas pasar keuangan Inggris dan menentukan bahwa ukuran pasar *Cryptocurrency* saat ini tidak cukup besar untuk menimbulkan “risiko material terhadap stabilitas moneter atau keuangan di Inggris. .

Kekhawatiran lain yang diangkat oleh penggunaan *Cryptocurrency* termasuk memastikan konsumen terlindungi saat menggunakan bentuk pembayaran, pencucian uang, perpajakan, dan penggunaan sistem ini untuk membiayai terorisme dan kejahatan lainnya. Berkenaan dengan perpajakan Inggris berpendapat bahwa *Cryptocurrency* memiliki identitas unik dan oleh karena itu tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan bentuk lain dari aktivitas investasi atau mekanisme pembayaran. Pajak penghasilan yang diterima dari mata uang kripto bergantung pada "aktivitas dan pihak yang terlibat". Pajak pertambahan nilai (PPN) hanya dikenakan dari pemasok untuk barang atau jasa yang dijual di Inggris dengan imbalan *Cryptocurrency*.

Aturan pajak perusahaan berlaku untuk bisnis untuk untung atau rugi dalam pertukaran mata uang, termasuk *Cryptocurrency*. Hal ini juga untuk perlakuan pajak mata uang virtual, aturan umum tentang valuta asing dan hubungan pinjaman berlaku. Inggris belum mengidentifikasi kebutuhan apa pun untuk mempertimbangkan aturan yang dipesan lebih dahulu. Setiap perusahaan yang melakukan transaksi yang melibatkan *Cryptocurrency* diperlakukan dengan cara yang sama seperti transaksi biasa di bawah peraturan pajak perusahaan saat ini, dan setiap keuntungan yang diperoleh akan dikenakan pajak yang sesuai.

Untuk bisnis tidak berbadan hukum, pajak penghasilan dibebankan pada keuntungan dan kerugian yang dapat dikaitkan dengan transaksi mata uang kripto. Inggris juga mengenakan pajak atas pendapatan dari transaksi di mana

keuntungan direalisasikan setelah transaksi dengan mata uang kripto jika pengguna individu membeli dan menjual koin sebagai investor. Keuntungan tersebut termasuk dalam pajak capital gain, dan pajak ini dibebankan pada keuntungan apa pun yang melibatkan *Cryptocurrency* (Library of Congress, 2018).

5. Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah pusat regulasi *Cryptocurrency* di dunia dan menentukan kecepatan, baik atau buruk, untuk banyak adopsi. Pertama-tama, undang-undang yang mengatur industri crypto bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian, dan otoritas federal juga menafsirkan dan mengaturnya secara berbeda. Misalnya, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, yang menganalisis transaksi untuk menandai kejahatan keuangan, tidak mempertimbangkan tender legal *Cryptocurrency*. Namun, sejak tahun 2013, telah mempertimbangkan pertukaran *Cryptocurrency* keuangan sebagai operator layanan dan token sebagai "properti lain" yang menggantikan mata uang.

Bursa harus mematuhi rekomendasi dari *Financial Action Task Force* dan mematuhi Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Internal Revenue Service, otoritas pajak negara, di sisi lain, memandang *Cryptocurrency* sebagai properti dan telah mengeluarkan panduan pajak. Beberapa regulator federal juga telah berjuang untuk mengawasi pertukaran *Cryptocurrency*. Komisi Sekuritas dan Bursa menganggap *Cryptocurrency* sebagai sekuritas, dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi menganggap Bitcoin sebagai komoditas dan mengawasi pasar derivatif *Cryptocurrency*.

Tahun 2020 dimulai dengan berita tentang pengenalan pembatasan baru, karena Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan bahwa kantor tersebut bermaksud untuk memperkenalkan aturan yang lebih ketat mengenai mata uang digital untuk mencegah transaksi yang mencurigakan menggunakan *Cryptocurrency*. Tetapi sebulan kemudian, Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai, yang memerangi kejahatan lintas batas di AS, mengembangkan metode baru

untuk melacak aktivitas kriptografi tanpa izin dan mengusulkan Program Intelijen *Cryptocurrency* untuk tahun 2021. Program intelijen *Cryptocurrency* menawarkan aturan dan persyaratan baru untuk pajak pelaporan untuk membuka jalan bagi adopsi teknologi blockchain secara luas di negara ini. *Cryptocurrency* tidak dilarang di A.S tetapi masih belum terintegrasi ke dalam struktur keuangan negara, dengan SEC (*Securities and Exchange Commission*) menghentikan upaya untuk mendaftarkan produk yang dapat diakses oleh investor reguler (Perez E, 2020).

6. Indonesia

Pada tanggal 13 Januari 2018, Bank Indonesia (bank sentral Indonesia) mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan agar tidak membeli, menjual, atau memperdagangkan mata uang virtual. Pernyataan tersebut meliputi Bank Indonesia menegaskan bahwa mata uang virtual, termasuk bitcoin, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga tidak boleh digunakan untuk pembayaran di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia dan setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang perlu dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipenuhi dengan Rupiah.

Pernyataan tersebut selanjutnya mengatakan bahwa kepemilikan mata uang virtual "sangat berisiko", "rentan terhadap risiko gelembung", dan "rentan untuk digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme." Oleh karena itu, Bank Indonesia memandang bahwa mata uang tersebut "berpotensi berdampak pada stabilitas sistem keuangan dan merugikan masyarakat secara finansial". Hal tersebut juga mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40 / PBI / 2016 tentang Pelaksanaan Proses Transaksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12 / PBI / 2017 tentang Penerapan Teknologi Keuangan dalam menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank melarang seluruh

penyelenggara sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi keuangan di Indonesia untuk memproses transaksi menggunakan mata uang virtual.

Pernyataan ini didukung oleh Menteri Keuangan dalam jumpa pers pada tanggal 23 Januari 2018, memperingatkan bahwa mata uang virtual adalah investasi berisiko tinggi dan spekulatif dan mengatakan bahwa juga akan terus berfungsi sebagai Pemerintah yang menyampaikan pandangan tersebut. bahwa itu tidak sesuai dengan Hukum untuk digunakan sebagai alat transaksi. Pernyataan Bank mengikuti siaran pers sebelumnya pada tahun 2014, di mana Bank mendorong kehati-hatian sehubungan dengan mata uang virtual dan menyatakan bahwa “mengingat Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Mata Uang dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 yang telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Bank Indonesia menyatakan bahwa bitcoin dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. (Library of Congress, 2018)

3.5 Petro: *Cryptocurrency* Buatan Pemerintah Venezuela

Untuk keperluan definisi, Venezuela Petro (PTR) adalah mata uang digital *Cryptocurrency* milik dan buatan Pemerintah Venezuela yang didukung oleh cadangan berbagai sumber daya alam di Venezuela seperti minyak, emas, berlian dan gas (Chohan, 2018). Pada saat penulisan ini, diperkirakan bahwa Petro akan didukung oleh satu barel minyak dari keranjang minyak mentah Venezuela dan didukung oleh aliran emisi yang dapat ditambang di masa depan. Penting untuk dicatat terlebih dahulu bahwa usulan penciptaan instrumen ini muncul setelah krisis ekonomi parah yang telah melumpuhkan pertumbuhan ekonomi di Venezuela. Beberapa dekade salah urus ekonomi telah menyebabkan ketergantungan yang serius pada pendapatan minyak, tetapi setelah harga minyak terus tertekan, sistem anggaran Venezuela menghadapi keruntuhan. Hal ini telah menciptakan tekanan pada Pemerintah untuk menemukan solusi alternatif untuk meringankan situasi fiskal yang semakin tidak dapat dipertahankan.

Petro adalah sebuah saran yang muncul sehubungan dengan keputusan fiskal yang meningkat, sebagai solusi parsial (bisa dibilang tidak memadai) untuk keadaan itu. Prinsip-prinsip dasar dimana Petro akan didukung termasuk: (1) dukungan negara melalui dukungan dari cadangan sumber daya alam seperti minyak, gas, emas dan berlian, (2) kemungkinan transaksi internasional, (3) pendaftaran digital transaksi melalui *Blockchain Observatory of Venezuela*, (4) penyebaran algoritma matematika terenkripsi yang tidak memungkinkan intersepsi dari agen eksternal, (5) transaksi elektronik tanpa perantara, (6) transaksi langsung tanpa komisi (Chohan, 2018).

Petro harus "dikendalikan" atau "diawasi" oleh *Blockchain Observatory of Venezuela*, yang dilampirkan pada Kementerian Pendidikan Universitas, Sains dan Teknologi. Peran penasehat ada untuk OnixCoin, sebuah perusahaan Venezuela yang mendirikan mata uang kripto sendiri. Menurut Pasal 4 Keputusan No. 3.196 yang diterbitkan dalam Lembaran Berita Resmi, Petro setara dengan "kontrak jual-beli untuk satu barel minyak dari keranjang minyak mentah Venezuela atau komoditas apa pun yang diputuskan oleh Bangsa." Cadangan pendukung "yang mendasarinya" adalah yang berada di lima miliar barel minyak dari blok Ayacucho I dari sabuk minyak Orinoco (Chohan, 2018: 3). Emas dan berlian dari lengkungan penambangan Orinoco Venezuela juga akan disertifikasi untuk tujuan ini.

Gagasan mata uang "Petro" sebenarnya mendahului daya tarik *Cryptocurrency* baru-baru ini dan lebih utama. Pada tanggal 3 Maret 2009, Presiden Venezuela saat itu, Hugo Chávez, selama tur di Timur Tengah dan Asia untuk meningkatkan harga minyak, mengangkat gagasan untuk menciptakan mata uang internasional yang disebut "petro" yang akan didasarkan terutama pada cadangan minyak dari beberapa negara di dunia (Chohan, 2018: 3)..

Pada tanggal 3 Desember 2017, Presiden Nicolas Maduro mengumumkan rencana pembentukan mata uang tersebut setelah "pertimbangan yang matang tentang masalah ini". Bersamaan dengan pengumuman mata uang digital baru,

Observatorium Blockchain Venezuela juga akan secara resmi dibuat, dilampirkan pada Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas, sebagai "basis" kelembagaan, politik dan hukum mata uang tersebut, serta bertanggung jawab mendaftarkan transaksi digital (Chohan, 2018). Pada Lembaran Resmi tanggal 8 Desember 2017, Pengawas *Cryptocurrency* dan Kegiatan Terkait diciptakan untuk "mengendalikan dan memantau" perilaku dan evolusi petro. Menurut rencana, untuk edisi pertama Petro, ada dukungan sebesar \$ 267 miliar dolar. Masuknya ke pasar akan melalui Pengawas *Cryptocurrency* dan Aktivitas Terkait melalui lelang awal atau penugasan langsung.

Pada tanggal 5 Januari 2018, Nicolas Maduro mengumumkan penerbitan seratus juta petro dan memberitahu publik bahwa kertas putihnya disajikan pada tanggal 14 Januari 2014. Carlos Vargas, pengawas perusahaan minyak, memastikan bahwa penjualan progresif dilakukan. Pada tanggal 9 Januari 2018, Majelis Nasional memperdebatkan petro tersebut, menyatakan penerbitan *Cryptocurrency* pertama dan berikutnya batal demi hukum. Wakil Alfonso Marquina menyatakan: "petro itu bukan *Cryptocurrency*; itu mewakili kontrak pembelian / penjualan berjangka yang aset dasarnya adalah satu barel minyak (Chohan, 2018: 4).

Mahkamah Agung Kehakiman Venezuela mempertahankan deklarasi bahwa Majelis Nasional dalam "penghinaan" dan tindakannya adalah "pembatalan mutlak". Pada tanggal 12 Januari 2018, Nicolas Maduro mengusulkan penggunaan minyak bumi di negara-negara anggota ALBA dan Petrocaribe sebagai "ukuran integrasi ekonomi". Pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, Departemen Keuangan Amerika Serikat memperingatkan investor Amerika Serikat bahwa penggunaan Petro dapat menyebabkan masalah hukum. Pada tanggal 29 Januari 2018, Presiden *National Association of Cryptocurrency* (ASONACRIP), José Ángel Álvarez, menyatakan bahwa Departemen Keuangan Amerika Serikat sedang berusaha mempolitisasi masalah Petro. Alvarez juga membahas masalah pertanian untuk melemahkan Petro di sekolah-sekolah menengah di seluruh

Venezuela melalui kursus mikro 4 bulan untuk melatih anak berusia 18 tahun sebagai "pekerja digital" (Chohan, 2018: 5).

Pada tanggal 30 Januari 2018, di Dewan Menteri No. 311, eksekutif nasional mengumumkan publikasi buku putih yang memuat kondisi dan fungsi mata uang kripto. Pada tanggal 1 Februari 2018, halaman web baru dari Pengawas Mata Uang Kripto dan Terkait Aktivitas Venezuela (Supcriptove) online dengan domain web "www.petro.gob.ve". Badan Pengawas menyatakan bahwa Petro akan digunakan sebagai alat pertukaran untuk mendapatkan barang atau jasa, uang fidusia dan cryptoassets lainnya, dan bahwa Pemerintah pusat akan menerimanya sebagai bentuk kontribusi, pembayaran pajak dan biaya sesuai dengan harga satu barel minyak dari keranjang Venezuela hari sebelumnya. Sedangkan Petro mewakili konseptualisasi *Cryptocurrency* di tahap awal, ia memang menimbulkan pertanyaan tentang gagasan (1) *Cryptocurrency* yang didukung Pemerintah, dan (2) *Cryptocurrency* sebagai instrumen yang didukung aset (Chohan, 2018: 5).

Akar filosofis cryptoanarchist dari *Cryptocurrency* cenderung mengarah pada disintermediasi Pemerintah dari intrusi dalam emisi dan pengawasan cryptoasset. Karena pertanggungjawaban dan pengawasan bukan pertimbangan utama dalam kerangka desentralisasi *Cryptocurrency*, gagasan bahwa Pemerintah yang mungkin menjadi penerbit *Cryptocurrency* sangat menarik dan memprihatinkan. Karena otoritas moneter biasanya tetap independen dari arsitektur politik di banyak negara saat ini, dan karena emisi dan regulasi mata uang yang didukung Pemerintah kemudian mengikat nilai mata uang yang mendasarinya dengan dukungan Pemerintah tersebut (Chohan, 2018: 5).

Selanjutnya, dalam kasus Petro, mata uang didukung oleh cadangan ekstraktif, yang harganya berfluktuasi di pasar komoditas dunia. Selain itu, mata uang memerlukan legitimasi asing jika ingin digunakan dalam perdagangan internasional, dan ketika Pemerintah (misalnya Departemen Keuangan Amerika Serikat) terlibat dengan *Cryptocurrency* dapat menghambat efektivitasnya. Lebih jauh lagi, gagasan bahwa Petro "dipantau" dan "dikendalikan" oleh

"observatorium" juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan tata kelola mengharuskan bahwa Observatory dan Superintendent Office mempertahankan independensinya (Chohan, 2018: 6) .

3.5.1 Dampak *Cryptocurrency* Bagi Venezuela

Bitcoin dan hiperinflasi mungkin adalah dua kata yang paling banyak disebutkan dalam percakapan sehari-hari di Venezuela. Perekonomian negara telah mengalami penurunan tajam sejak Presiden Nicolás Maduro berkuasa pada tahun 2013, tetapi sekarang telah mencapai titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Christopher Sabatini, peneliti senior untuk Amerika Latin di Chatham House, menggambarkan situasi tersebut sebagai krisis ekonomi dan kemanusiaan terburuk di dunia, yang didalamnya tidak ada perang. Dengan adanya perkembangan mengenai mata uang digital, masyarakat internasional mengambil teknik yang telah berhasil dengan baik di bagian dunia yang lebih maju dan menerapkannya di wilayah yang kurang berkembang. Perubahan yang mereka perkenalkan membuat teknik tersebut bekerja dengan sangat baik sehingga suatu wilayah, yang dulunya pinggiran, menjadi pusatnya sendiri. Pada negara Venezuela, fintech, dan lebih khusus lagi *Cryptocurrency*, semakin populer (Araujo F, 2019).

Lebih dari krisis ekonomi dan politik, perasaan tidak percaya kepada Pemerintah Venezuela di setiap tingkat masyarakat Venezuela. Masyarakat Venezuela mencari cara untuk beroperasi di luar sistem hanya untuk membeli barang dan jasa. Memilih *Cryptocurrency* seperti bitcoin di Venezuela daripada bolivar hanyalah strategi bertahan hidup lainnya. *Cryptocurrency* petro nasional Venezuela diluncurkan oleh Presiden Nicolas Maduro pada bulan Oktober 2018 sebagai alternatif dari bolivar yang terus menurun. Hal ini seharusnya didukung oleh cadangan minyak Venezuela yang kaya, tetapi seperti apa pun yang didukung oleh Pemerintah Venezuela di Caracas, petro tersebut gagal lepas landas. Kritikus mengatakan itu adalah tipu muslihat Pemerintah lainnya untuk menghindari sanksi internasional.

Lebih penting lagi, rata-rata orang Venezuela, lebih peduli tentang dari mana makanan mereka selanjutnya datang, tidak cukup tahu tentang itu. Pada dasarnya di Venezuela, koneksi internet rata-rata adalah seperempat megabyte atau paling banyak satu megabyte. Orang-orang masih belum memiliki akses ke jenis informasi ini dan mereka takut menggunakan sesuatu yang tidak berwujud (Petro). Namun, di tengah kekacauan dan kurangnya informasi, ada bukti bahwa *Cryptocurrency* membuat semacam perbedaan.

Joe Waltman, direktur eksekutif GiveCrypto, sebuah organisasi nirlaba yang mendistribusikan *Cryptocurrency* kepada orang-orang dalam kemiskinan mengatakan bahwa ketika memberi orang crypto, mereka juga mendirikan toko yang menerima pembayaran dalam crypto dan memiliki mitra pembayaran sehingga mereka dapat menukar crypto dengan uang tunai. Joe Waltman juga menambahkan bahwa Saat dirinya melacak sejumlah dampak secara metrik, seperti keamanan pangan dan kesejahteraan psikologis orang-orang yang memiliki beri crypto, mereka melihat peningkatan statistik yang signifikan saat menerima bantuan Crypto. Bahkan *Cryptocurrency* tidak kebal terhadap volatilitas pasar. Dua tahun lalu ada semacam kegilaan bitcoin, memicu fluktuasi harga liar di seluruh pasar. *Cryptocurrency* adalah alat tahan sensor yang menarik untuk pengiriman uang, tetapi volatilitas dapat membuat token crypto menjadi media berbahaya untuk transfer dan tabungan (Araujo F, 2019).

Pada satu sisi, *Cryptocurrency* telah memungkinkan beberapa orang Venezuela dengan akses ke komputer, pengetahuan, dan teknologi blockchain untuk menerima uang dari keluarga dan teman mereka di luar negeri. Pada sisi lain, sistem tersebut masih jauh dari inklusif. Terkadang, ini bisa menjadi sangat diskriminatif, ketika orang yang sangat miskin tidak memiliki akses ke akun online atau kerabat yang tinggal di luar negeri. Jadi, meskipun crypto bermanfaat, itu bukanlah solusi yang jitu. Secara historis, ekonomi yang sukses selalu ditopang oleh kepercayaan. Ketika segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya, orang merasa percaya diri untuk berinvestasi dan membeli barang.

Pada tingkat yang paling mendasar, masalah di Venezuela adalah kredibilitas. Pada seluruh dunia, orang yang hidup di bawah rezim yang menindas telah menemukan cara untuk melanjutkan hidup, dalam banyak kasus dengan bantuan teknologi. Negara Venezuela, crypto dalam bentuk bitcoin dan *Cryptocurrency* lainnya mungkin memberikan harapan, tetapi itu bukanlah solusinya. Christopher Sabatini, peneliti senior untuk Amerika Latin di Chatham House mengatakan bahwa kunci utama dari stabilitas moneter adalah kepercayaan, di setiap kesempatan, Pemerintah Nicolas Maduro telah menunjukkan keberpihakannya, korupsi, kurangnya transparansi dan kesediaannya untuk memanipulasi kebijakan fiskal, mata uang dan moneter. Cadangan kepercayaan masyarakat telah menguap dan perlu Pemerintah lain untuk memulihkannya, terlepas dari perkembangan industri fintech (Araujo F, 2019).

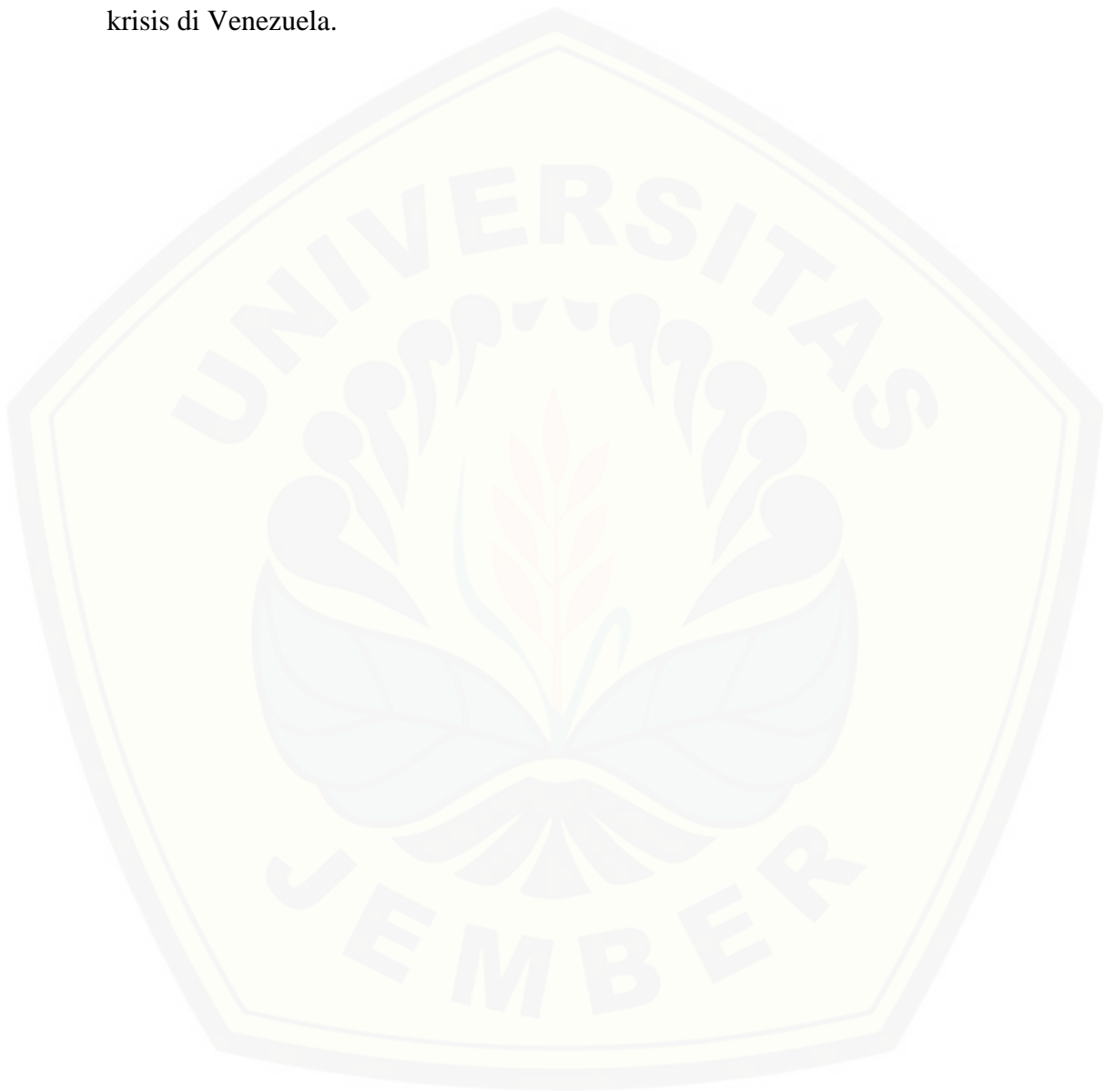
BAB 5. KESIMPULAN

Presiden Nicolas Maduro yang berusaha mempertahankan kekuasaannya di Venezuela dengan menggunakan *Cryptocurrency* sebagai salah satu instrumennya. Petro yang merupakan nama dari *Cryptocurrency* yang dibuatnya disokong oleh cadangan minyak yang dimiliki Venezuela. Prakteknya, Presiden Nicolas Maduro dalam menggunakan Petro sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan memiliki strategi yang berbeda antara level domestik dan internasional. Pada level domestik Presiden Nicolas Maduro gencar membuat propaganda bahwa Petro bagaikan Kryptonite yang merupakan lawan tradisional yang melemahkan Superman maksudnya adalah bahwa Petro mampu melemahkan dominasi Amerika Serikat yang dianggap Venezuela sebagai dalang dari krisis yang dialami Venezuela. Bersamaan dengan itu, oposisi diwacanakan sebagai kaki tangan Amerika Serikat yang juga memperburuk kondisi krisis.

Selanjutnya pada level internasional strategi Presiden Nicolas Maduro adalah menggandeng erat dua sekutu utama yang juga merupakan negara pendonor bagi Venezuela, yakni Rusia dan China. Sebagai proyek pertama pembuatan *Cryptocurrency* nasional, Petro bisa jadi menguntungkan bagi Rusia yang mempunyai ambisi serupa. Rusia menginginkan dibuatnya Cryptoruble, namun masih dalam tahap mempertimbangkan kelayakan dan kemungkinan resiko yang akan muncul kedepannya. Maka dari itu upaya Presiden Nicolas Maduro menggaet Rusia tergolong lancar meskipun secara publik Rusia masih berusaha menutup-nutupi keterlibatannya. Sebaliknya China secara terbuka mendukung pembuatan Petro. Alasannya sederhana, meskipun sanksi perdagangan minyak dikeluarkan Amerika Serikat, China tetap membeli minyak Venezuela. Bahkan mencari kesepakatan-kesepakatan baru yang lebih menguntungkan. Begitu pula dengan penggunaan Petro, China siap mendukungnya selama itu menguntungkan bagi China.

Penelitian ini difokuskan hanya pada *Cryptocurrency* yang digunakan sebagai instrumen Presiden Nicolas Maduro untuk mempertahankan

kekuasaannya di Venezuela yang menggunakan konsep two level game Putnam untuk menganalisis penerapannya pada ranah domestik dan internasional. Penelitian selanjutnya dapat dilaksanakan dengan mengkaji upaya penerapan *Cryptocurrency* di negara selain Venezuela atau perkembangan penyelesaian krisis di Venezuela.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusman. 2018. *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*. Diakses dari situs http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx pada 14 Januari 2018.
- Agustiyanti. 2017. *Krisis Keuangan, Venezuela Bakal Terbitkan Mata Uang Digital*. Diakses dari situs <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171205130920-78-260240/krisis-keuangan-venezuela-bakal-terbitkan-mata-uang-digital> pada 13 Januari 2018.
- Amnesty International. 2017. *Silenced by Force: Politically-Motivated Arbitrary Detentions in Venezuela* diunduh dari <https://www.amnestyusa.org/reports/silenced-force-politically-motivated-arbitrary-detentions-venezuela/> pada 15 Agustus 2018
- Appelbaum, D., & Stein Smith, S. 2018. *Blockchain Basics and Hands-on Guidance: Taking the Next Step toward Implementation and Adoption*. CPA Journal
- Armario. 2018. *Venezuela's digital coin makes debut*. Diakses dari ctvnews.com <https://www.ctvnews.ca/mobile/sci-tech/venezuela-s-digital-coin-makes-debut-1.3811457?cache=?clipId=64268>. Pada 15 Januari 2020
- Bajpai, Prableen. 2015. *Countries Where Bitcoin Is Legal and Illegal*. Diakses dari situs <https://www.investopedia.com/articles/forex/041515/countries-where-bitcoin-legal-illegal.asp> pada 21 Maret 2018.
- Bakry, Umar Suryadi. 2015. *Ekonomi Politik Internasional: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baron, Joshua dkk. 2015. *National Security Implication of Virtual Currency: Examining the Potential for Non State Actor Deployment*. California: Rand Corporation.
- Bergen, V., Franz, 2016. *Venezuelans now stealing food from school cafeterias as scarcity spreads*. Diakses dari *Fox News*:<http://www.foxnews.com/world/2016/06/24/criminals-now-stealing-food-from-venezuela-schools-as-scarcity-spreads.html>. Pada 28 Januari 2020
- Bertelsmann Stiftung, *BTI 2016 — Venezuela Country Report*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2016.
- Bitcoin.com. 2017. *Venezuela Launches Its First Regulated Bitcoin Exchange Monkeycoin with Draglet*. Diakses dari situs <https://news.bitcoin.com/venezuela-launches-first-regulated-bitcoin-exchange-monkeycoin-draglet> pada 12 Januari 2018.

- Blockchain.info. 2018. *Market Price (USD)*. Diakses dari situs <https://blockchain.info/charts/market-price?timespan=1year> pada 13 Januari 2018.
- Bohme, Rainer dkk. 2015. *Bitcoin: Economics, Technology and Governance*. Journal of Economic Perspectives Volume 29 Nomor 2. Nashville: American Economic Association
- Button, S. (2018). *Cryptocurrency and Blockchains in Emerging Economies*. Software Quality Professional
- Cardenas, Jose R. 2018. *Don't Let Venezuela's Government Smear the Opposition's Brightest Star*. Diakses dari situs <https://foreignpolicy.com/2018/06/27/dont-let-venezuelas-government-smear-the-oppositions-brightest-star/> pada 13 Agustus 2018.
- Carroll, Rory. 2017. *Nicolas Maduro: Will Venezuela's President Drag His People to The Edge?* Diakses dari situs <https://www.theguardian.com/world/2017/jul/29/observer-profile-nicolas-maduro-venezuela-hugo-chavez> pada 1 Juni 2018.
- Cawthorne, Andrew dan Corina Pons. 2017. *Venezuela Unrest Death Toll Rises, Chávez Statue Destroyed*. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/venezuela-unrest-death-toll-rises-chavez-statue-destroyed-idUSKBN1811X3> pada 15 Agustus 2018.
- CGTN. 2019. *World reactions to Venezuela's political crisis*. Diakses dari CGTN :<https://news.cgtn.com/news/3d3d514f32516a4d32457a6333566d54/index.html>. Pada 2 September 2020
- Chohan, Usman., W. 2018. *Cryptocurrencies as Asset-Backed Instruments: The Venezuelan Petro*. Diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3119606 Pada 28 Januari 2020
- Choudhury, Saheli Roy. 2017. *Cash is Useless in Venezuela Thanks to Hyperinflation- So People are Turning to Bitcoin*. Diakses dari situs <https://www.cnbc.com/2017/08/24/bitcoin-mining-is-popular-in-venezuela-because-of-hyperinflation.html> pada 12 Januari 2018.
- Christensen, Clayton M. dkk. 2015. *What is Disruptive Innovation?*. Desember 2015 issue. Brighton: Harvard Business Review.
- Cifuentes, A., F. 2018. *Bitcoin in Troubled Economies: The Potential of Cryptocurrencies in Argentina and Venezuela*. Diunduh dari : <https://doi.org/10.29263/lar03.2019.05> pada 28 Januari 2020
- CNBC Report. 2017. *Japan Made Bitcoin a Legal Currency: Now It's More Popular Than Ever*. Diakses dari Channel Youtube CNBC International pada 13 Januari 2018.

- CNN Indonesia. 2018. *Venezuela Hiperinflasi 10 Juta Persen AFP*, CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181009112411-134-336862/venezuela-hiperinflasi-10-juta-persen> pada 29 Januari 2020
- Coindesk. *Bitcoin (USD) Price*. Diakses dari Coindesk: <https://www.coindesk.com/price/>. Pada 11 Februari 2020
- Cove, R. 2017. How did Bitcoin come to be?. Diakses dari: <https://marketrealist.com/2017/11/how-did-bitcoin-come-to-be>. Pada 24 November 2019
- Creswell, John W. 2017. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- CRS Report. 2017. *Venezuela: Background and U.S. Policy*. Congressional Research Service.
- Digitalis.id. 2019. Apa Itu Bitcoin dan Apa Bedanya Dengan Vexanium. Diakses pada : <https://digitalis.id/blog/apa-itu-bitcoin-beda-dengan-vexanium/> Pada 31 Desember 2020
- DolarToday. 2017. *Histórico Dólar paralelo en Venezuela*. Diakses dari DolarToday, <https://dolartoday.com/historico-dolar/>. Pada 28 Januari 2020
- Ducas, Evangeline dan Alex Wilner. 2017. *The Security And Financial Implications of Blockchain Technologies: Regulating Emerging Technologies in Canada*. International Journal Volume 72 Nomor 4. Sage Publication.
- Durden, T. 2017. Valuing Bitcoin Using Metcalfe's Law. Diakses dari : <https://www.zerohedge.com/news/2017-11-28/bitcoins-valuation-usingmetcalfes-law>. Pada 24 November 2019
- Durden, T. 2017. This Is What The Death Of A Nation Looks Like: Venezuela Prepares For 2,300% Hyperinflation. Diakses dari : <https://www.zerohedge.com/news/2017-10-10/what-death-nation-looks-venezuela-prepares-2300>. Pada 24 November 2019
- Dw.com. 2018. *Venezuela's Own Bitcoin-Like Cryptocurrency – The Petro*. Diakses dari situs <http://www.dw.com/en/venezuelas-own-bitcoin-like-cryptocurrency-the-petro/a-42052601> pada 13 Januari 2018.
- Eka, Randi. 2018. Mengenal *Cryptocurrency* dan Mekanisme Transaksinya. Dari dailysocial.id : <https://dailysocial.id/post/mengenal-Cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya> Pada 5 Januari 2020
- Ellsworth B, Martinez I A. 2018. *Venezuela aims for crypto alchemy with new 'petro gold' token*. Diakses dari Reuters : <https://www.reuters.com/article/uk-crypto-currencies-venezuela/venezuela-aims-for-crypto-alchemy-with-new-petro-gold-token-idUSKCN1G52S2>. Pada 19 Desember 2020

- Flannery, Nathaniel Parish. 2017. *Political Risk Analysis: Venezuela's Economic Crisis*. Diakses dari situs <https://www.forbes.com/sites/nathanielparish/flannery/2017/04/11/is-venezuelas-political-crisis-worsening/#2239bd8323d1> pada 12 Januari 2018.
- Foro Penal. 2018. *List of Political Prisoners*. Diakses dari situs <https://foropenal.com/en/presos-politicos/#listado-presos-politicos> pada 03 September 2018.
- Haig, S. 2019. *Venezuelan Petro Against US Sanctions: History and Use of the Crypto*. Diakses dari Cointelegraph : <https://cointelegraph.com/news/venezuelan-petro-against-us-sanctions-history-and-use-of-the-crypto>. Pada 2 September 2020
- Hamid, Edy Suandi. 2017. *Disruptive Innovation: Manfaat dan Kekurangan dalam Konteks Pembangunan Ekonomi*. Diakses dari situs <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-27-fh-uui-semnas-disruptive-innovation-manfaat-dan-kekurangan-dalam-konteks-pembangunan-ekonomi-Edy-Suandi-Hamid.pdf> pada 18 Maret 2018.
- Idler, Annette. 2017. *Venezuela's Instability has Far Broader Implications, Here's What's at Stake*. Diakses dari situs https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/08/10/venezuelas-instability-has-far-broader-implications-heres-whats-at-stake/?utm_term=.fca4fae7e51e pada 13 Januari 2018.
- Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kleinman, J. 2018. *Why Bitcoin's Price Is So Volatile*. Diakses dari : Konowicz, D. R. 2018. *The New Game: Cryptocurrency Challenges US Economic Sanctions*. Naval War College Newport United States.
- Krauss, Clifford. 2017. *Wider U.S. Sanction on Venezuela Risk Biting Both Countries*. Diakses dari situs <https://www.nytimes.com/2017/07/27/business/venezuela-sanctions-oil-maduro-vote.html> pada 12 Januari 2018.
- Lacrus. 2018. *The crisis of the Bolivarian Alliance for the Peoples of our America: is there a chance of overcoming it?*. Diakses dari : <https://lacrus.org/en/2018/01/12/the-crisis-of-the-bolivarian-alliance-for-the-peoples-of-our-america-is-there-a-chance-of-overcoming-it/>. Pada 7 Oktober 2019
- Lampa, Roberto. 2017. *Crisis in Venezuela, or the Bolivarian Dilemma: To Revolutionize or to Perish? A Kaleckian Interpretation*. Review of Radical Political Economics Volume 49 Nomor 2. Sage Publication. <https://lifehacker.com/why-bitcoin-s-price-is-so-volatile-1822143846>. Pada 12 Juni 2020
- Liao, Shannon. 2018. *No one is using or selling Venezuela's alleged oil-backed Cryptocurrency*. Diakses dari the Verge :

- <https://www.theverge.com/2018/9/4/17818518/venezuela-petro-oil-backed-Cryptocurrency-used-buy-sell-scam>. Pada 19 Desember 2020
- Library of Congress. 2018. Regulation of *Cryptocurrency* Around the World. Diakses dari : <https://www.loc.gov/law/help/Cryptocurrency/world-survey.php>. Pada 3 Agustus 2019
- Macias A, Imbret F. 2019. Here's how US-Venezuela tensions got to the brink of crisis. Diakses dari : <https://www.cnbc.com/2019/01/24/heres-how-us-venezuela-relations-got-to-this-point.html>. Pada 9 Desember 2019
- Martucci, B. 2017. What Is *Cryptocurrency* – How It Works, History & Bitcoin Alternatives. Diakses dari : <https://www.moneycrashers.com/Cryptocurrency-history-bitcoin-alternatives/>. Pada 24 November 2019
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mauliana, Vina A. 2017. *Krisis Ekonomi Memburuk, Inflasi di Venezuela Capai 4000 Persen*. Diakses dari situs <http://bisnis.liputan6.com/read/3172571/krisis-ekonomi-memburuk-inflasi-di-venezuela-capai-4000-persen> pada 11 Januari 2018.
- Maya, Margarita Lopez. 2014. *The Political Crisis of Post-Chavismo*. Special America Revisited Volume 40 Nomor 4. Social Justice.
- McCharty, Michael M. 2017. *The Venezuelan Crisis and Latin America's Future: Toward Robust Hemispheric Agenda on Democratic Stability*. Washington: Wilson Center.
- McCharty, Michael M. 2017. *Venezuela's Manmade Disaster*. Philadelphia: Current History.
- Mitchell, W. C. (2001). *The Old and New Public Choice: Chicago Versus Virginia*. In W. F. Shughart II, & R. Laura, *The Elgar Companion to Public Choice*. Edward Elgar.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Nelson, Rebecca. 2018. Venezuela's Economics Crisis: Issues For Congress. Congressional Research Service Report 7-5700. <https://fas.org/sgp/crs/row/R45072.pdf> diakses pada 5 Desember 2018
- Nuh. M., Syarif. 2011. Hakekat *Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 18 APRIL 2011
- Puddington, Arch dan Tyler Roylance. 2017. *Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy*. Washington: Freedom House.
- Rahardjo, M. (2017, May 28). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Diakses dari UIN Malang Repository:

- <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf> pada 27 Maret 2018
- Ramadhani, Niko. 2020. Mengenal Lebih Jauh Apa Itu *Cryptocurrency* dalam Dunia Finansial. Diakses dari : <https://www.akseleran.co.id/blog/Cryptocurrency-adalah/>. Pada 31 Desember 2020
- Rands, Kevin. 2017. *Why Venezuela's Currency Crisis is A Case Study for Bitcoin*. Diakses dari situs <https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/02/03/why-venezuelas-currency-crisis-is-a-case-study-for-bitcoin/#3c9fe85019b2> pada 14 Januari 2018.
- Relyea, H.C. 2001. National Emergency Powers. CRS Report for Congress. Diakses dari <https://www.everycrsreport.com> pada 22 Februari 2020
- Rendon M, Fernandez C. 2020. *The Fabulous Five: How Foreign Actors Prop up the Maduro Regime in Venezuela*. <https://www.csis.org/analysis/fabulous-five-how-foreign-actors-prop-maduro-regime-venezuela>. Pada 19 Desember 2020
- Restuccia, Diego. 2018. The Monetary and Fiscal History of Venezuela 1960-2016. MFHLA paper. https://www.economics.utoronto.ca/diegor/research/MFHLA_paper.pdf diakses pada 5 Desember 2018.
- Rosati, Andrew. 2017. *Maduro Hands Wide-Ranging Powers to Venezuela's Vice President*. Diakses dari situs <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-30/maduro-hands-wide-ranging-powers-to-venezuela-s-vice-president> pada 16 Agustus 2018.
- Páez, Tomás. 2017. *La diáspora venezolana en movimient*. Diakses dari *El Nacional*, : http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/diaspora-venezolana-enmovimiento_194392. Pada 28 Januari 2020
- Perez, Elena. 2020. How the US and Europe Are Regulating Crypto in 2020. Diakses dari [cointelegraph.com](https://cointelegraph.com/news/how-the-us-and-europe-are-regulating-crypto-in-2020) : <https://cointelegraph.com/news/how-the-us-and-europe-are-regulating-crypto-in-2020>. Pada 8 Agustus 2020
- Sanchez, Fabiola dan Christine Amarilo. 2017. *Venezuela's Chief Prosecutor Decries Violence as Deaths Rise*. Diakses dari situs <https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-4444858/Venezuela-chief-prosecutor-denounces-violence-deaths-rise.html> pada 20 Agustus 2018.
- Saputra, Mochammad Andy. 2017. *Krisis Ekonomi dan Tuntutan Demokratisasi di Venezuela*. Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
- Shughart II, W. F., & Laura, R. (2001). *Introduction: Public Choice at The Millennium*. In W. F. Shughart II, & R. Laura, *The Elgar Companion to Public Choice*. Edward Elgar.

- Shuster, Simon. 2018. *Exclusive: Russia Secretly Helped Venezuela Launch a Cryptocurrency to Evade U.S. Sanctions*. Diakses dari time.com: <https://time.com/5206835/exclusive-russia-petro-venezuela-Cryptocurrency/>. Pada 13 Februari 2020
- Silja, B., Dutta, S., & Lanvin, B. (2016). *The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy*. Geneva: World Economic Forum.
- Smith, Larratt C. 2019. Here's why Venezuelan President Nicolás Maduro is still in power. Diakses dari Washington Post : <https://www.washingtonpost.com/politics/2019/08/14/heres-why-venezuelan-president-nicolas-maduro-is-still-power/>. Pada 28 Desember 2020
- Sprint, Detlef F. Dan Yael Wollinsky Nahimas. 2004. *Models, Number, and Cases: Method for Studying International Relations*. The University of Michigan Press.
- Staff Reuters. 2018. *Venezuela's Congress declares 'petro' Cryptocurrency illegal*. Diakses dari situs <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-economy/venezuelas-congress-declares-petro-Cryptocurrency-illegal-idUSKBN1EY2H2> pada 14 Januari 2018.
- Suberg, William. 2017. *Venezuela Shuts Down Bitcoin Exchange, Arrests More Miners*. Diakses dari situs <http://bitcoinist.com/venezuela-shuts-bitcoin-exchange-arrests-miners/> pada 14 Januari 2018.
- Surbhi, S. 2015. *Difference Between Communism and Socialism*. Diakses dari situs <https://keydifferences.com/difference-between-communism-and-socialism.html> pada 2 Juni 2018.
- The Carribean Council. 2020. Maduro says PetroCaribe to be revived this year. Diakses dari : <https://www.caribbean-council.org/maduro-says-petrocaribe-to-be-revived-this-year/>. Pada 4 April 2020
- The Economist. 2013. *Corruption in Venezuela: The Billion-Dollar Fraud*. Diakses dari situs <https://www.economist.com/the-americas/2013/08/10/the-billion-dollar-fraud> pada 13 Agustus 2018 pada 15 Agustus 2018.
- The Economist. 2017. *How Chavez and Maduro Have Impoverished Venezuela*. Diakses dari situs <https://www.economist.com/finance-and-economics/2017/04/06/how-chavez-and-maduro-have-impoverished-venezuela>. Pada 14 Agustus 2018.
- Turpin, Jonathan B. 2014. *Bitcoin: The Economic Case for a Global, Virtual Currency Operating in an Unexplored Legal Framework*. Indiana Journal of Global Legal Studies Volume 21 Nomor 1. Indiana University Press.

- Vásquez, Alex. 2017. *Venezuelans use bitcoin 'mining' to escape inflation*. Diakses dari <https://www.yahoo.com/news/venezuelans-bitcoin-mining-escape-inflation-020507653.html>. Pada 28 Januari 2020
- Verrastro, F.A. 2019. *The Oil Industry Won't Save Venezuela*. Center for Strategic and International Studies. Diakses dari : <https://www.csis.org/analysis/oil-industry-wont-save-venezuela>. Pada 2 September 2020
- Volkering, Sam. 2017. *Crypto Revolution: Bitcoin, Cryptocurrency and The Future of Money*. London: Southbank Investment Research Ltd.
- Wijaya, Dimaz Ankaa dan Oscar Darmawan. 2017. *Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia*. Jasakom.com
- Wulf C. 2018. *Bitcoins in Venezuela: Examining the Origins, Nature, and Viability of Cryptocurrencies in the Hyperinflated Country of Venezuela*. Diakses dari : <https://pdxscholar.library.pdx.edu/honorstheses/518/>. Pada 4 april 2019
- Wyckoff, Andrew dkk. 1999. *The Economic and Social Impact of Electronic Commerce: Preliminary Findings and Research Agenda*. Paris: OECD.
- Yin, Robert K. 1994. *Case Study Research*. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications.
- Yin, Robert K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford
- Zuniga, Mariana. 2017. *Bitcoin Mining is Big Business in Venezuela, But The Government Wants to Shut It Down*. Diakses dari situs https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/10/bitcobi-mining-is-big-business-in-venezuela-but-the-government-wants-to-shut-it-down/?utm_term=.b2bc322ebd38 pada 13 Januari 2018.